
Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, yang tidak hidup menyendiri melainkan senantiasa berinteraksi sosial, berkomunikasi, berhubungan dengan alam sekitar berkiprah dengan lingkungan beragam situasi dan kondisi, yang dapat berdampak positif atau berisiko negatif, yang semuanya memerlukan kajian serta pembenahan oleh berbagai disiplin ilmu agar kerukunan, keharmonisan eksistensinya berkembang, bertambah baik dari waktu ke waktu.

Bahan Belajar Mandiri ini untuk membekali Anda mengkaji, menganalisis lebih seksama wawasan IPS, sehingga diharapkan Anda memiliki kemampuan:

1. Hakekat dan Rasional IPS.
2. Paradigma Pendidikan IPS dalam konteks Indonesia.
3. Materi Pendidikan IPS

Semua kemampuan diatas sangat penting bagi semua mahasiswa calon sarjana dan atau calon guru professional dalam mempersiapkan diri dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan Sosial dan ilmu-ilmu sosial sebagai bahan pembelajaran di sekolah dasar. Hal ini sangat penting bagi mahasiswa guru dan atau calon guru pemula yang sering mengalami hambatan/kesulitan dalam memahami pelajaran IPS dan ilmu-ilmu sosial.

Khusus bagi calon guru kelas dan guru pemula mata pelajaran IPS di SD, diharapkan agar sedapat mungkin memperbanyak pengkajian untuk pengembangan materi pembelajaran IPS sehingga proses kegiatan belajar mengajar akan lebih menarik dan diharapkan siswa akan belajar lebih antusias. Dengan demikian Anda akan terbantu dan tidak mengalami kesulitan dalam pengembangan materi pembelajaran.

Apabila Anda telah memiliki kemampuan dan penguasaan konsep-konsep dasar ilmu sosial secara mendalam, mengemas dan mengembangkan bahan pelajaran secara baik-baik, disesuaikan dengan kebutuhan siswa juga disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional maka diharapkan siswa merasa terbantu dalam proses belajarnya.

Untuk membantu Anda dalam mencapai tujuan kemampuan di atas ikutilah petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. bacalah dengan cermat bagian pendahuluan samapai Anda memahami betul-betul apa, untuk apa dan bagaimana cara mempelajari ,modul ini.
2. Bacalah sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci yang Anda anggap baru carilah baca pengertian kata-kata sulit (glosarium) atau dalam kamus atau ensiklopedia
3. Silahkan Anda fahami pengertian dari isi modul ini melalui persepsi Anda sendiri dan Atau tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau dengan tutor Anda.

KB.1. Hakikat dan Rasionalisasi Bidang Studi IPS.

Apa itu IPS ? Manusia selain sebagai makhluk Tuhan juga sebagai makhluk sosial yang dalam hidup dan kehidupannya tidak bisa terlepas dengan sesama manusia lain, artinya tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa adanya interaksi, berkomunikasi, berhubungan dengan lingkungan alam sekitar dimanapun berada dengan beragam situasi dan kondisi, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif terhadap hidup dan kehidupan sosial budaya manusia Indonesia.

Sadar serta mengalami berbagai situasi kehidupan tersebut, manusia berupaya merespon mengantisipasi berbagai permasalahannya, maka menimbulkan berbagai pemikiran, memunculkan berbagai konsep yang terus menerus secara berkesinambungan dikaji, dianalisis, dirangkum, disimpulkan sehingga menjadi ilmu, yang diberi nama Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Sosial.

Di bawah ini marilah kita simak pengertian ilmu pengetahuan sosial dari beberapa orang para ahli.

Udin. S Winataputra dkk. Pilar histories-epistemologis. Social studies yang pertama, berupa suatu definisi tentang "social studies" yang dipancarkan oleh Edgar Bruce Wesley pada tahun 1937 (Barr, Barth, dan Shermis, 1977:1-2) yaitu *The social Studies are the social sciences simplified pedagogical purposes* . artinya adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pengetian ini kemudian dibakukan dalam *The United States of Education's Standard Terminologi for Curriculum and Instruction* (dalam Darr dan kawan-kawan, 1977:2) sebagai berikut :*the social studies comprised of those aspects of history ,economics, politick, science, sociology, anthropology, psychology ,geography, and philosophy which in practice are selected for purposes in schools and college.*

Maksudnya, bahwa social studies berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, dan filsafat, yang dipilih untuk tujuan pembelajaran sekolah dan perguruan tinggi.

Hamid Hasan, beliau berpendapat bahwa istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran ditingkat sekolah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah "social studies" dalam kurikulum di negara lain khususnya di negara-negara Barat seperti Australia dan Amerika Serikat. Namun pengertian IPS di tingkat persekolahan itu sendiri mempunyai perbedaan makna, khususnya pelajaran IPS untuk SD dengan IPS untuk sekolah Menengah Pertama (SMP) dan IPS untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pengertian IPS di persekolahan tersebut ada yang berarti program pengajaran, ada yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri, ada yang mengartikan sebagai gabungan (paduan) dari sejumlah mata pelajaran atau beberapa disiplin ilmu. Perbedaan ini dapat diidentifikasi dari perbedaan pendekatan yang diterapkan pada masing-masing jenjang persekolahan. Pada dasarnya disiplin-disiplin ini adalah sumber utama materi pendidikan untuk ilmu-ilmu sosial. Materi pendidikan adalah apa yang dipelajari siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, dalam hal ini tujuan kurikulum ilmu-ilmu sosial . termasuk dalam pengertian materi ini ialah substansi dan proses yang berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Pendidikan ilmu-ilmu sosial harus berkaitan dengan materi yang diajarkan dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya. Selanjutnya beliau menyarankan pengertian substansi ilmu-ilmu sosial umum yang terdiri atas *pandangan,*

tema, topik, fenomena, fakta, peristiwa, prosedur, konsep, generalisasi dan teori, yang secara tradisional biasanya dinamakan materi kurikulum. Kurikulum adalah hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok bahasan yang berdasarkan pandangan, *tema, fenomena, fakta, konsep* dan sebagainya. Sedangkan menurut pandangan baru memasukan ke dalam pengertian materi kurikulum adalah *proses, prosedur, dan langkah-langkah* yang harus dilaksanakan oleh siswa dalam menyelesaikan aspek-aspek substantif. Dalam menyelesaikan kurikulum ini diartikan sebagai apa yang dipelajari dan bagaimana mempelajarinya.

Nursid Sumaatmadja (1980; 7-8) berpendapat bahwa studi sosial (Social Studies) berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Studi sosial bukan merupakan bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial, untuk mengkaji masalah-masalah sosial tentunya studi sosial lebih bersifat praktis dari pada akademis teoritis. Hal ini didasarkan pada bentuk gejala dan mendesak. Oleh karena itu pendekatannya digunakan bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan terpadu (integrated). Dengan demikian, bentuk dan studi sosial lebih banyak menunjukkan pada program studi gabungan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu.

Selanjutnya "NCSS" – National Council for the Social Studies (NCSS ; 1983) mengemukakan : "Pada dasawarsa 1980-an perkembangan social studies ditandai oleh lahirnya dua pilar akademis, yaitu *Report of the National Council for Social studies Task Force on Scope and Sequence* berjudul "*In search of A Scope and Sequence for Social Studies* (NCSS :1983)m dan *A report of the Curriculum Task Force of the National Commission on Social Studies in the School*" yang berjudul "*Charting A Course : Social Studies for 21*" Century (NCSS: 1989). Laporan pertama menghasilkan definisi, tujuan, lingkup, dan urutan materi mulai dari "Kindergarten" sampai dengan kelas XII (High School), rincian "democratic beliefs an values", dan rincian *Skill in Social Studies Curriculum*

Definisi "social studies" yang diajukannya adalah:

"Social Studies is basic subject of the K-12 curriculum that (1) derives its goal from the nature citizenship in a democratic society that is closely linked to other nations an peoples of the word; (2) draw its content primarily from history, the social sciences, and in some respect from humanities of the personal; and (3) is taught in ways that reflect an awareness of the personal, social, and cultural experiences and developmental of leaner" (NCSS, 1983:251).

Yang rumusan tujuannya adalah sebagai berikut:

"Social studies programs have responsibility to prepare young people to identify, understands and work to solve problems that face our increasingly diverse nation and interdependence word. Over the past several decades, the professional consensus has been that such programs ought to include goals in the broad areas of knowledge, democratic value, and skills. Program that combine that acquisition of knowledge and skill with the application of democratic values to life, through social participation present an ideal balance in social studies. It is essential that these major goals be viewed au equally important. The relationship among knowledge, values, and skills is one of mutual support" (NCSS, 1983: 251)

“Social studies” kalau dilihat dari definisi dan tujuannya akan tersurat dan tersirat sebagai berikut : Pertama, merupakan mata pelajaran dasar diseluruh jenjang pendidikan persekolahan; kedua tujuan utama mata pelajaran ini ialah mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang cukup untuk berperan serta dalam kehidupan demokrasi; ketiga, konten atau isi pelajarannya digali dan diseleksi dari sejarah dari ilmu-ilmu sosial, serta dalam banyak hal dari humaniora dan sains, dan keempat, pembelajarannya menggunakan cara-cara yang mencerminkan kesadaran bermasyarakat, pengalaman budaya dan perkembangan pribadi siswa

Menurut laporan NCSS yang kedua dalam Udin S. Winataputra “Charting a course” nampak jelas upaya untuk mempertegas visi, misi dan strategi social studies dalam laporan NCSS yang pertama Scope and Sequency. Menurut laporan tersebut untuk abad ke-21, social studies curriculum seyogyanya memiliki ciri-ciri yang menitik beratkan pada *roles of citizen in democracy*; memberikan “*consisten and cumulative learning from kindergarten through 12th grade*” menuntut *history and geography should provide matrix of framework for social studies*” memusatkan kurikulum bukan hanya pada “*major civilization and societies*; mengembangkan jaringan keterkaitan ilmu social dengan *the humanities and the natural and physical sciences*; menempatkan konten untuk diperlakukan sebagai hal yang harus diterima dan diingat menuntut penerapan proses pembelajaran interaktif, seperti *writing, observing, debating, role-play or simulation, working with statistcal data using, eritical thinking skill*, memanfaatkan (media dan sumber belajar; pemberian dukungan dari seluruh jajaran pengelola pendidikan dan menempatkan *essential knowledge* dalam pembelajaran di setiap jenjang pendidikan persekolahan.

Supriya dalam James A. Bank (1990:3) dalam bukunya “Teaching Strategis for the social studies” mendefinisikan social studies adalah sebagai bagian dari kurikulum sekolah dasar dan menengah yang mempunyai tanggung jawab pokok untuk membantu para siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang diperlukan dalam hidup bernegara di lingkungan masyarakatnya. Menurut Bank, tujuan mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup bernegara merupakan tujuan utamanya (its primary goal).

Welton dan Mallan memandang bidang studi social sebagai mata pelajaran gabungan yaitu : (1) disiplin ilmu-ilmu sosial; (2) temuan-temuan (atau pengetahuan) yang berasal dari disiplin ilmu-ilmu social dan (3) proses-proses yang dilakukan oleh ilmuwan sosial dalam menghasilkan temuan atau pengetahuan itu. Secara singkat Welton dan Mallan merumuskan defenisi studi social sebagai berikut” *Sosial studies as a composite subject area based*

Rasionalisasi

Indonesia adalah suatu negara yang besar dan luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, membentang dari Sabang sampai Maroke beragam etnik dan kebudayaan, yang kaya dengan sumber daya alamnya, baik yang ada di laut maupun yang ada di darat, seperti hutan, tambang, flora dan fauna. Negara yang dibangun dengan banyak pengorbanan dari para pahlawan dengan mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga menjadi suatu negara

kesatuan. Selain memiliki potensi kekayaan alam juga memiliki populasi penduduk yang sangat besar jumlahnya dengan berbagai perbedaan strata sosial, etnik, ras, suku, agama dan kebudayaan. Semua itu perlu dipelajari, difahami dan disadari, sehingga akan tumbuh rasa persatuan dan kesatuan, patriotisme, nasionalisme dan etos kerja pada diri siswa untuk membangun bangsa dan negara agar maju dan berkembang sejajar dengan negara-negara lain yang sudah maju.

Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu mata pelajaran yang mengajarkan kepada siswa dari mulai SD /MI, agar mereka dapat mengenal berbagai fenomena-fenomena lingkungan alam sekitarnya sampai dengan fenomena-fenomena dunia.

Dalam kenyataannya, hidup dan kehidupan manusia ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia akan berdampak pada lingkungannya. Dalam mempertahankan hidupnya manusia akan saling ketergantungan baik dengan sesama manusia maupun dengan dunia. Manusia perlu memahami hubungan yang sangat kompleks ini . Oleh sebab itu, pembelajaran Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi dan Ekonomi di SD/MI dipadukan pada mata pelajaran Ilmu Sosial. Integrasi kurikulum Ilmu sosial ini diwadahi dalam topik-topik yang dekat dengan lingkungan sosial dimana anak itu berada. Hal ini diharapkan dalam merencanakan pelajaran tersebut menjadi lebih bermakna dan menarik bagi siswa daripada mengacu pada disiplin ilmu-ilmu tersebut.

Ilmu sosial merupakan suatu pendekatan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan manusia dengan masyarakat dan lingkungannya. Ilmu sosial ini mempelajari tentang aspek-aspek sosial, spiritual, emosional, intelektual, rasional dan global dengan memadukan konsep-konsep serta bahan kajian tradisional dengan bidang kajian yang baru.

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran Ilmu Sosial yang efektif, sangat penting bagi guru adalah mengetahui perjalanan belajar siswa usia muda. Karena pada usia muda ini siswa memiliki rasa ingin tahu yang alami tentang lingkungan sosial dan lingkungan alam mereka. Selain mereka berinteraksi, mereka juga merupakan bagian dari berbagai kelompok termasuk keluarga, teman, masyarakat yang membawa berbagai pengalaman dan pengetahuannya ke sekolah.

Dalam pengembangan kurikulum Ilmu Sosial yang harus dipertimbangkan adalah permasalahan-permasalahan yang pernah dialami pada kurikulum sebelumnya. Mata pelajaran IPS SD pada kurikulum tahun 1994 menyebutkan bahwa IPS di Sekolah Dasar terdiri atas kajian: Pengetahuan Sosial dan Sejarah. Jadi kurikulum IPS SD merupakan kesimpulan dari kedua bahan kajian tersebut.

Permasalahannya adalah kurikulum tahun 1994 masih mengandung terlalu banyak materi dan bahan kajian. Oleh karena itu perbaikan kurikulum yang dilakukan saat ini adalah melakukan integrasi bahan-bahan kajian dari ilmu-ilmu sosial.

Perbedaan antara kurikulum tertulis dan kurikulum terlaksana merupakan permasalahan lain yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan indentifikasi permasalahan kurikulum sebelumnya disebutkan bahwa ruang lingkup yang luwes pada masing-masing materi menyebabkan penulis buku dan guru mengalami kesulitan dalam menetapkan kedalaman dan keluasan materi. Akibatnya adalah masih terdapat beberapa materi SD yang lebih tinggi dan lebih kompleks dari yang atasnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dikembangkan kurikulum Ilmu Sosial yang terintegrasi dan berbasis pada kemampuan dasar. Kemampuan dasar adalah merupakan uraian kemampuan yang

memadai atas pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai materi pokok. Kemampuan itu harus dimiliki dan dikembangkan secara maju dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan siswa

Paradigma Pendidikan IPS dalam konteks Indonesia

Pemikiran tentang konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran social studies dari negara Barat yaitu dari Amerika Serikat, yang merupakan salah satu negara yang kita anggap sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang ilmu sosial.. Reputasi tersebut dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu, seperti yang telah dipublikasikan pertama kali oleh *National Council for the Social Studies* (NCSS) pada tanggal 28-30 November 1935 sampai sekarang

Konsep Ilmu Pengetahuan untuk pertama kalinya masuk dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972-1973, yakni :dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPISP) IKIP Bandung. Yang secara kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam Seminar Civic Education di Tawangmangu, seperti Achmad Sanusi, Noeman Somantri, Achmad Djahiri, dan Dedih Suwardi semuanya berasal dari IKIP Bandung, dan pada pengembangan Kurikulum PPSP FKIP Bandung berperan sebagai anggota tim. Dalam Kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah “Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial” sebagai mata pelajaran terpadu. Penggunaan garis miring nampaknya mengisyaratkan adanya pengaruh dari konsep pengajaran social yang walaupun tidak diberi label IPS, telah diadopsi dalam Kurikulum SD tahun 1968. Tentang kurikulum 1968 mengalami sedikit perubahan dari “Pengetahuan Kewarganegaraan” menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan”, namun dalam lingkup materinya hampir sama. Adapun didalamnya mencakup mata pelajaran Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, dan Civic atau disebut Pengetahuan Kewargaan Negara. Pada Kurikulum SD tahun 1975 unsur Pendidikan Kewargaan Negara dipisahkan dari pengajaran IPS, dan dijadikan bidang pengajaran tersendiri dengan nama “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP). Pengajaran PMP diajarkan sejak kelas I Sekolah Dasar, sedangkan pengajaran IPS diajarkan sejak kelas III Sekolah Dasar. Hal ini dimaksudkan materi pelajaran yang diajarkan pada kelas I SD tidak terlalu memberatkan siswa, karena materi IPS menuntut siswa untuk banyak membaca buku teks, sedangkan kemampuan membaca mereka masih sangat terbatas. Dalam Kurikulum 1975 pendidikan IPS menampilkan empat propil, yakni (1) Pendidikan Moral Pancasila menggantikan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi *citizenship transmission*; (2) pendidikan IPS terpadu untuk Sekolah Dasar; (3) pendidikan IPS *terkonfederasi* untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG (Dep. P dan K, 1975a,, 1975b, 1975c; dan 1976). Semua konsep pendidikan di atas tetap dipertahankan dalam kurikulum 1984, yang secara konseptual merupakan penyempurnaan kurikulum 1975. Penyempurnaan materi disesuaikan dengan perkembangan baru pada masing-masing disiplin, yaitu dengan masuknya Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) sebagai materi pokok Pendidikan Moral Pancasila.

Pada Kurikulum 1994 yaitu kurikulum yang menggantikan Kurikulum 1984, dimana pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan dijadikan satu mata

pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Nama dan ruang lingkupnya hampir sama, artinya tidak banyak mengalami perubahan, perbedaannya pada Kurikulum 1994 lebih mengutamakan pendekatan *inquiry*., sehingga siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial. Karena pelajaran ini berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk melihat tentang kenyataan sosial yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Mata pelajaran PPKn pada Kurikulum IPS tahun 1994 merupakan mata pelajaran yang khusus dan wajib diikuti oleh semua siswa pada setiap jenjang pendidikan dari mulai SD sampai dengan SMU. Mata pelajaran diwujudkan : (1) pendidikan IPS terpadu di SD kelas III sampai dengan kelas VI; (2) pendidikan IPS terkonfederasi di tingkat SLTP yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi koperasi; (3) pendidikan IPS yang terpisah-pisah yang mirip dengan tradisi *in social studies taught as social science* (Barr dan kawan-kawan (1978). Pendidikan IPS terpisah-pisah yang terdiri atas mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas I dan II; Ekonomi dan Geografi di kelas I dan II, Sosiologi ; Sosiologi di kelas II; Sejarah Budaya di kelas III Program Bahasa; Ekonomi, Sosiologi, Tata Negara, dan Antropologi di kelas III Program IPS.

Semua mata pelajaran sosial mempunyai tujuan yang beragam atau bervariasi. Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum bertujuan untuk “...menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga sekarang, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia” (Depdikbud, 1993: 23-24). Dimensi tujuan tersebut pada dasarnya mengandung esensi pendidikan kewarganegaraan atau tradisi “*citizenship transmission*” (Bar, dan kawan-kawan: 1978). Mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan obyektif (Depdikbud, 1993: 29). Sedang untuk program IPS mata pelajaran ekonomi ini bertujuan untuk “...memberikan bekal kepada siswa mengenal beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi” (Depdikbud, 1993: 29). Dari rumusan tujuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tujuan pendidikan Ekonomi di SMU baik untuk program umum maupun untuk program IPS mengisyaratkan diterapkannya tradisi *social studies taught as social science* (Barr, dan kawan-kawan: 1978). Tradisi ini tampaknya diterapkan juga dalam mata pelajaran Sosiologi, Geografi, Tata Negara, Sejarah Budaya, dan Antropologi sebagaimana dapat dikaji dari masing-masing tujuannya. Mata pelajaran Sosiologi memiliki tujuan “...untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya ketentuan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat” (Depdikbud, 1993: 30). Sementara itu mata pelajaran Geografi memusatkan perhatian pada upaya “...untuk memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya” (Depdikbud, 1993: 30). Sedangkan untuk mata pelajaran Tata Negara menggariskan tujuan “...untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan

negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, sistem pemerintahan negara RI maupun Negara lain” (Depdikbud, 1993: 31).

Menyimak perkembangan “*social studies*” secara umum dan Pendidikan IPS di Indonesia saat ini maka perlu adanya reorientasi pendidikan IPS sebagai berikut :

1. Menegaskan kembali visi pendidikan IPS sebagai program pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan individu siswa sebagai “aktor sosial” yang mampu mengambil keputusan yang bernalar dan sebagai ”warga negara yang cerdas, memiliki komitmen, bertanggung jawab, dan partisipatif”.
2. Menegaskan kembali misi pendidikan IPS untuk memanfaatkan konsep, prinsip, dan metode ilmu-ilmu sosial dan bidang keilmuan lain untuk mengembangkan karakter aktor sosial dan warga Negara Indonesia yang cerdas dan baik.
3. Memantapkan kembali tradisi pendidikan IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan yang diwadhahi oleh mata pelajaran Kewarganegaraan dan sebagai pendidikan sosial yang diwadhahi oleh mata pelajaran IPS terpadu dan mata pelajaran IPS terpisah.
4. Menata kembali sarana programatik pendidikan IPS untuk berbagai jenjang pendidikan (Kurikulum, Satuan Pelajaran, dan Buku Teks) sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan IPS.
5. Menata kembali system pengadaan dan penyegaran guru pendidikan IPS sehingga dapat menghasilkan calon guru dan guru pendidikan IPS yang profesional.

L A T I H A N

1. Apa yang dimaksud dengan definisi IPS yang dikemukakan oleh Edgar Bruce dan Wesley?
2. Apa yang dimaksud dengan pengertian IPS di tingkat persekolahan mempunyai perbedaan makna ?
3. Apa yang dimaksud dengan Citizenship Transmission ?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan Integrated.?

Petunjuk Jawaban latihan

1. *The Social Studies are the social sciences simplified pedagogical purpose*, yang artinya adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan
2. pengertian IPS persekolahan tersebut ada yang berarti program pengajaran, ada yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri dan ada yang mengartikan sebagai gabungan dari sejumlah mata pelajaran itu terdiri dari beberapa disiplin ilmu
3. yang dimaksud dengan citizen transmission adalah dimana pendekatan pembelajaran IPS ditujukan untuk membentuk siswa agar menjadi warga negara yang baik, jadi materi yang disajikan lebih banyak yang berhubungan dengan kewarganegaraan
4. yaitu materi IPS dalam kurikulum dituangkan secara terpadu (terintegrasi), sehingga tidak terlihat lagi warna dan ciri-ciri khas ilmu-ilmu sosial yang menunjang (seperti geografi, sejarah, ekonomi dan sebagainya).

Rangkuman

Ilmu Sosial adalah suatu mata pelajaran yang mengajarkan kepada siswa dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, agar mereka dapat mengenal berbagai fenomena-fenomena lingkungan sekitarnya sampai dengan fenomena-fenomena dunia.

Ilmu sosial merupakan suatu pendekatan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan manusia, masyarakat dan lingkungan, karena ilmu sosial mempelajari tentang aspek-aspek sosial, spiritual, emosional, intelektual, rasional, dan global dengan memadukan konsep-konsep serta bahan kajian tradisional dengan bidang – bidang kajian yang baru.

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran Ilmu-ilmu Sosial dengan efektif, maka guru harus mengetahui dan memahami tentang perjalanan belajar siswa dalam usia muda, dimana pada usia muda ini siswa memiliki rasa ingin tahu yang alami tentang lingkungan alam dimana mereka berada. Selain mereka berinteraksi, mereka juga merupakan bagian dari berbagai kelompok termasuk keluarga, teman, masyarakat yang membawa berbagai pengalaman dan pengetahuannya ke sekolah.

Dalam pengembangan kurikulum Ilmu Sosial yang harus diperhatikan dan perlu dipertimbangkan adalah permasalahan-permasalahan yang pernah dialami pada kurikulum sebelumnya.

Pemikiran tentang konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran sosial studies dari negara Barat yaitu dari Amerika Serikat, yang merupakan salah satu Negara yang kita anggap sebagai warganegara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang ilmu sosial.

TES FOMATIF 1.

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1. Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah merupakan mata pelajaran ditingkat sekolah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah “social studies”. Istilah ini dikemukakan oleh ...
 - A. Hamid Hasan
 - B. Ki Hadjar
 - C. Nursid Sumaatmadja
 - D. Udin. S Winataputra.
2. Pengertian IPS dipersekolahan ada yang berarti program pengajaran, ada yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri, ada yang mengartikan sebagai gabungan dari sejumlah mata pelajaran atau beberapa disiplin ilmu. Perbedaan ini dapat diidentifikasi dari...
 - A. Perbedaan pendekatan masing-masing program
 - B. Perbedaan pendekatan yang diterapkan pada masing-masing jenjang persekolahan
 - C. Perbedaan pendekatan disiplin ilmu
 - D. Perbedaan dari sekolah masing-masing.
3. “NCSS” merupakan singkatan dari...
 - A. National Commission for the Studi Social

- B. National Curriculum for the Social Studies.
 - C. National Council for the Social Studies.
 - D. National Commite for the Social Studies.
4. Seorang guru SD mengajarkan IPS dengan tema “Kebakaran”, namun guru tersebut menghunungkan materi dengan materi pelajaran IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Olah raga dan Kesehatan. Dengan demian guru itu telah menerapkan proses pembelajaran
- A. Intregrated
 - B. Multidisipliner
 - C. Interdisipliner
 - D. Terpisah.
5. Pendidikan ilmu-ilmu sosial harus berkaitan dengan materi yang diajarkan, hal ini sangat penting dalam rangka...
- A. manusia seutuhnya
 - B. manusia yang mampu berdiri sendiri
 - C. manusia yang berjwa sosial
 - D. manusia yang tergantung kepada orang lain.
6. Indonesia adalah negara yang majemuk, baik dilihat dari sisi agama, ras dan budaya. Perbedaan dalam bahasa daerah termasuk kemajemukan dari sisi :
- A. Agama
 - B. Ras.
 - C. Budaya
 - D. Mata pencaharian.
7. Terdapat beberapa suku bangsa dan ras di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali :
- A. Suku bangsa Kubu di Jambi
 - B. Suku Baduy di Jawa Barat
 - C. Suku bangsa Dayak di Kalimantan
 - D. Suku bangsa Aborijin di Sulawesi.
8. Wujud dari kebudayaan itu ada tiga macam, yaitu
- A. Ide (gagasan), kegiatan, dan hasil karya
 - B. Ide (gagasan), hasil karya dan mata pencaharian
 - C. Bahasa, kesenian, dan adat istiadat
 - D. Norma, hukum, dan nilai-nilai.
9. Pemikiran tentang konsep pendidikan IPS di Indonesia bantak dipengaruhi oleh pemikiran social stufies dari Barat, yaitu dari Negara...
- A. Amerika Serikat
 - B. Inggris
 - C. Jepang
 - D. India.

10. Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial untuk pertama kali masuk dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun...
- A. 1978-1980
 - B. 1974-1976
 - C. 1972-1973
 - D. 1986-1987

BALIKAN & TINDAK LANJUT

Cocokkanlah jawaban anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat dibagian akhir Bahan Belajar Mandiri ini. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, kemudian gunakan rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda dalam materi Kegiatan Belajar 2.

Rumus

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat melanjutkan dengan kegiatan belajar 2. akan tetapi, jika tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, silahkan Anda mengulangi kembali mempelajari Kegiatan Belajar 1, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

KB. 2. Materi pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Pada dasarnya, disiplin-disiplin ilmu (sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi dan sebagainya) adalah sumber utama materi pendidikan untuk ilmu-ilmu sosial. Materi pendidikan adalah apa yang dipelajari siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu tujuan kurikulum ilmu-ilmu sosial, termasuk dalam pengertian materi ini adalah *substansi* dan *proses* yang berasal dari disiplin-disiplin ilmu-ilmu sosial.

Pendidikan ilmu-ilmu social tidak hanya berhubungan dengan pengajaran materi ilmu-ilmu sosial, melainkan juga berkaitan dengan dengan materi pendidikan yang diajarkan dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu sesuai dengan tujuan yang akan dikembangkan dari luar disiplin ilmu dan umumnya materi tersebut digunakan untuk mengembangkan nilai, sikap, dan moral siswa. Realita kehidupan di masyarakat atau pada suatu bangsa, di sebuah negara hendaklah dijadikan materi dasar dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial yang terus dikembangkan untuk berbagai aspek.

Pada umumnya pengertian substansi ilmu-ilmu sosial terdiri atas *pandangan, tema, topik, fenomena, fakta, peristiwa, prosedur, konsep, generalisasi dan teori*, yang secara tradisional dinamakan kurikulum. Yang dimaksud kurikulum adalah yang berhubungan dengan pokok-pokok bahasan yang berisikan pandangan, tema, fenomena, fakta, konsep dan sebagainya.

Menurut pandangan baru yang dimaksud dengan pengertian materi kurikulum, adalah proses, prosedur, dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh siswa dalam mempelajari substansi tersebut, dalam arti apa yang dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Secara reknis pembahsan mengenai aspek apa dan bagaimana tersebut dipisahkan agar pendalaman terhadap apa yang dijadikan materi bahasan ini dapat dilakukan. Materi kurikulum yang dikembangkan dari disiplin ilmu harus dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan yang akan dicapai, semakin kuat keterkaitannya, maka semakin besar kemungkinan materi tersebut akan dipilih sebagai materi kurikulum. Untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial, setiap disiplin ilmu akan memberikan kontribusi, kontribusi itu tergantung dari pendekatan pengembangan materi kurikulum yang dipakai. Setiap pendekatan pengembangan disiplin baik mandiri atau terpisah memerlukan proses pengembangan materi yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan korelatif atau intregratif.

1. Konsep

Konsep adalah suatu abstraksi suatu kelompok benda atau stimuli yang memiliki persamaan karakteristik. Hasil dari pengabstraksian tersebut kita beri label atau nama yang merupakan "*nama konsep*". Dengan demikian nama konsep tersebut akan memberikan nama konsep yang satu dengan yang lain. Menurut Bruner, Goodnow dan Austin (1962). Konsep diartikan sebagai *abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat*, kesamaan yang dimaksud adalah adanya unsur-unsur yang sama baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk yang abstrak. Keterhubungan artinya adanya hubungan antara berbagai benda atau sifat baik yang sifatnya konkret maupun yang sifatnya abstrak dan terjadi hanya atas dasar pemikiran abstrak tertentu pula. Contoh : manusia adalah konsep. Jenis kelamin laki-laki-laki atau wanita juga

konsep. Yang membedakan antara laki-laki dan wanita adalah atribut-atributnya seperti : bentuk fisik, suara, alat kelamin dan sebagainya.

Hamid Hasan dalam Novak dan Gowin (1986 ; 3-4) lebih menyenangi keteraturan yang dipersepsikan (*perceived regularities*) untuk menyebutkan abstraksi kesamaan antara benda atau sifat tersebut. Keteraturan yang mereka maksud adalah keteraturan dalam apa yang dikatakan sama-sama memiliki suatu konsep. Kesamaan yang dimiliki aspek-aspek kegiatan manusia dalam suatu budaya membentuk apa yang disebut konsep budaya. Kesamaan yang dikenal dan diidentifikasi manusia adalah kesamaan yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dan bukan kesamaan yang terlihat segera dengan mata.

Suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan atribut. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki oleh suatu konsep. Gabungan beberapa atribut akan merupakan suatu pembeda antara satu konsep dengan konsep lainnya. Contoh kecil misalnya meja memiliki atribut ukuran, bentuk. Ukuran meja bisa kecil atau besar, bentuknya bisa persegi, oval, persegi panjang, atau persegi empat. Kaki meja ada yang berkaki empat, kaki dua bahkan berkaki satu. Contoh lain seperti yang dikemukakan oleh Hamid Hasan danau memiliki atribut ukuran, bentuk tempat, dan isi danau. Berdasarkan atribut itu danau dibedakan dengan benda lainnya tetapi untuk membedakan danau dengan laut diperlukan hanya atribut ukuran, bentuk dan tempat/lokasi. Danau memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan laut, bentuk yang berbeda serta letak yang berbeda pula. Untuk membedakan danau dari kolam renang digunakan atribut bentuk, ukuran dan juga letak. Tetapi untuk membedakan danau, laut dan lautan maka atribut ukuran lebih mengena. Bentuk tidak dapat digunakan sebagai pembeda antara ketiganya (laut dan lautan tidak dapat dibedakan dari bentuk fisiknya). Letak tidak dapat juga dijadikan pembeda antara ketiganya. Walaupun letak hanya satu atribut tapi ia memiliki daya beda yang kuat untuk ketiganya.

Contoh konsep lainnya yang lebih sederhana dari danau adalah buku. Setiap orang mengenal buku dan setiap peserta didik akan selalu berhubungan dengan buku. Buku adalah suatu konsep yang memiliki atribut seperti sampul, halaman, fungsi, dan juga bentuk. Berdasarkan atribut-atribut ini orang membedakan antara buku dari koran. Keduanya memiliki halaman tetapi beda dalam karakteristiknya, dan juga berbeda dalam sampul dan fungsi. Orang juga membedakan buku dari majalah walaupun keduanya mempunyai sampul dan halaman tetapi fungsinya berbeda. Buku tulis dan buku pelajaran adalah dua konsep yang berbeda. Keduanya memiliki bentuk fisik, isi dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu keduanya dibedakan oleh ketiga atribut tersebut.

Jumlah atribut yang dimiliki setiap konsep berbeda. Ada yang memiliki satu atribut tetapi ada pula yang lima atau lebih. Semakin banyak jumlah atribut berarti semakin banyak kesamaan yang dituntut di antara benda atau sifat yang menjadi anggota konsep tersebut. Dengan demikian ia semakin membatasi jumlah benda atau sifat yang dapat menjadi anggotanya. Hal ini disebabkan karena semakin banyak atribut semakin sulit untuk memenuhi apa yang dituntut atribut ini.

Semakin banyak atribut yang dimiliki suatu konsep semakin sedikit benda atau sifat yang menjadi anggotanya. Sebagai contoh konsep danau di atas. Dengan atribut yang dimilikinya maka laut dan kolam renang tidak dapat menjadi anggota konsep danau. Tetapi dengan menggunakan hanya atribut bentuk maka danau, laut, lautan dan juga kolam renang dapat dijadikan anggota. Untuk itu diperlukan label konsep baru yang

dapat menaungi anggota-anggotanya yang banyak itu dan memiliki sifat-sifat yang sama antara anggotanya.

Contoh lainnya ialah untuk konsep kambing lebih banyak dibandingkan dengan atribut untuk konsep binatang. Atribut untuk konsep kambing terdiri atas bentuk, bau, cara hidup, ekor, janggut, kaki, kuku. Atas dasar itu seekor binatang dinamakan kambing dan yang lainnya tidak. Sedangkan untuk konsep binatang dimana kambing, gajah, ular dan sebagainya menjadi anggota, yang diperlukan hanyalah atribut bentuk dan cara hidup.

Hal lain yang dapat dikatakan mengenai konsep dan atributnya ialah keterhubungan antara atribut dengan nilai atribut sebagai pembeda antara satu jenis konsep dengan jenis konsep lainnya. Dalam disiplin ilmu-ilmu sosial dikenal adanya tiga jenis konsep berdasarkan perbedaan keterhubungan nilai atribut tersebut yakni *konsep konjungtif*, *konsep disjungtif*, dan *konsep relasional* (Bruner, Goodnow, dan Austin, 1956; De Cecco, 1964). Konsep konjungtif adalah konsep yang paling rendah. Dalam konsep ini benda atau sifat yang menjadi anggota konsep memiliki persamaan yang tinggi dalam nilai atributnya. Misalnya, kalau orang berbicara tentang *buku ilmiah* dengan atribut isi buku, warna sampul, ketebalan buku, serta pembaca buku maka apabila ada sejumlah buku yang memiliki isi, semuanya mengenai ekonomi makro, warna sampul semuanya merah, ketebalan buku semuanya berkisar sekitar 300 halaman, serta semua buku itu ditulis untuk mahasiswa yang baru belajar ilmu ekonomi. Buku tadi yang dinamakan buku ekonomi mikro membentuk suatu konsep yang *konjungtif*. Konsep konjungtif biasanya memiliki jumlah atribut yang banyak.

Konsep *disjungtif* adalah konsep yang memiliki anggota dengan atribut yang memiliki nilai beragam. Pengelompokan benda atau sifat tersebut dalam suatu konsep karena atributnya memberikan kemungkinan terjadinya perbedaan dalam nilainya. Konsep ini memang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan konsep konjungtif dan oleh karena proses abstraksi terhadap nilai-nilai atribut. Menemukan kebersamaan diantara ketidakbersamaan memang bukan pekerjaan mudah (pernyataan ini tidak menyatakan bahwa sesuatu yang ilmiah harus selalu sukar tetapi kesukaran dihubungkan dengan tingkat abstraksi).

Salah satu contoh konsep disjungtif ialah alat kantor. Atribut untuk konsep ini tidak mungkin berupa bentuk atau pun fungsi khusus suatu benda yang dinamakan alat kantor. Fungsi kertas sebagai alat kantor adalah untuk ditulis sedangkan fungsi mesin tik sebagai alat kantor adalah untuk mengetik. Fungsi yang berbeda dimiliki pula oleh apa yang disebut dengan ballpoint, penggaris, marking pen, dan sebagainya. Meskipun demikian benda-benda ini dikelompokkan sebagai satu konsep yang diberi label alat kantor karena mereka semuanya mendukung untuk suatu tujuan yaitu kegiatan kantor.

Contoh konsep *disjungtif* lainnya adalah *hewan* dengan anggota yang beragam seperti kuda, ayam, ular, atau renik. Demikian pula dengan konsep manusia walaupun anggotanya hanya wanita dan pria. Konsep disjungtif dapat dan sudah mungkin dipelajari oleh siswa SMP karena mereka sudah berada pada tingkat berfikir yang formal. Oleh karena itu siswa SMP sudah pula dapat mempelajari pengertian pulau, gunung, laut, pasar dan sebagainya.

Jika konsep yang paling abstrak adalah konsep *relasional*. Dalam konsep ini kebersamaan antara anggotanya dalam suatu atribut hanyalah berdasarkan kriteria yang abstrak dan selalu dalam hubungan dengan kriteria tertentu (relasional). Ia tercipta karena

adanya relasi yang diciptakan dalam pengertian yang dikandungnya. Ambil contoh konsep jarak. Konsep ini dikembangkan berdasarkan kedudukan dua titik. Apabila kedudukan dua titik itu dihitung secara objektif maka yang diperoleh adalah angka yang menggambarkan posisi kedua titik tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran itu jarak kedua titik tadi dapat dikatakan jauh atau dekat atau sedang. Pada waktu seseorang menyebutkan jarak itu sedang maka apa yang ada pada dirinya (dan mungkin disepakati orang lain) adalah suatu bandingan dengan posisi dua titik dalam hal yang lain.

Konsep dalam disiplin ilmu-ilmu sosial sangat abstrak. Konsep yang digunakan sedemikian abstrak sehingga kadang-kadang digunakan istilah *konstrak* (*construct*) untuk menyatakan bahwa konsep itu terbentuk sebagai hasil pemikiran abstrak. Untuk konsep yang demikian proses berfikir diferensi yang lebih tinggi diperlukan karena didalamnya terlibat berbagai kegiatan kognitif tinggi seperti pengelompokkan benda atau sifat (analisis), identifikasi persamaan-persamaan (analisis), identifikasi sifat keterhubungan (analisis), menentukan keutuhan antar komponen untuk satu kelompok baru (sintesis), dan pemberian label (sintesis, karena ia harus dapat menarik kesimpulan tentang keutuhan kebersamaan antar komponen). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial harus mengembangkan kemampuan berfikir.

Tabel : Konsep-konsep Penting Dalam Beberapa Disiplin Ilmu-ilmu Sosial

SEJARAH	GEOGRAFI	EKONOMI
Fakta Sejarah Waktu Ruang Sumber Penafsiran Perubahan Cerita Sejarah Bukti Sejarah Peristiwa Pelaku Sejarah Hukum Sebab-Akibat Kronologi Artefak	Fakta Geografi Ruang Waktu Distribusi Asosiasi Wilayah Wilayah Skala Interaksi Keruangan Peta Lingkungan Arah Bentuk Wilayah Cuaca	Fakta Sosiologi Keinginan Sumber Distribusi Produksi Konsumsi Pasar Modal Benda Jasa Penghasilan Pengeluaran Perkembangan
SOSIOLOGI	ANTROPOLOGI	ILMU POLITIK
Fakta Sosiologi Nilai Norma Institusi Kelompok Kelas Komunitas Kelompok Etnis Inovasi Sistem Sosialisasi Status Peran Interaksi Masyarakat Modernisasi Perubahan	Fakta Antropologi Kebudayaan Kebutuhan Struktur Keluarga Tradisi Perubahan Kelompok Etnis Inovasi Sistem Akulturasi Enkulturasi Evolusi Ras Kekerabatan	Fakat Ilmu Politik Kekuasaan Tuntutan Struktur Tekanan Kebijakan Kedudukan Kelompok Penekan Demokrasi Pemerintahan Norma Isu Konflik Tujuan Sistem Nilai Organisasi Hak Kewajiban Warganegara

2. Teori dan Generalisasi

Hamid Hasan, dalam teori menurut Goetz dan LeCompte (1984: 36) adalah komposisi yang dihasilkan dari pengembangan sejumlah proposisi atau generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis. Selain sistematis, keterhubungan antara proposisi ataupun generalisasi tersebut sudah harus teruji kebenarannya secara empirik dan dianggap berlaku secara universal.

Melalui teori para ilmuwan dapat menjelaskan fenomena sosial yang ada. Sebagai contoh, dalam ekonomi dikenal adanya teori tentang harga, permintaan dan penawaran, dan sebagainya. Teori tentang harga menjelaskan keterhubungan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Dalam teori ini dikemukakan apabila pembeli memiliki interest yang tinggi terhadap suatu barang dan memiliki daya saing dengan pembeli lain maka harga yang akan ditetapkan oleh penjual akan tinggi. Sebaliknya, apabila pembeli memiliki daya beli rendah dan tanpa saingan penjual akan menetapkan harga pada tingkat yang lebih rendah.

Berdasarkan teori ini maka para ekonom dapat menjelaskan berbagai fenomena jual beli di pasar, dari kegiatan pasar yang paling sederhana sampai ke kegiatan pasar yang paling kompleks. Dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial kedudukan teori sebagai materi kurikulum sangat penting. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa tugas suatu disiplin ilmu adalah mengembangkan teori.

Keberhasilan yang menjadi idaman disiplin ilmu tercermin dalam kebenaran dan kekuatan teori yang dianutnya. Lagi pula, dengan menggunakan teori sebagai materi kurikulum, ada kemungkinan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan sedemikian rupa sehingga akan terjadi apa yang dimaksud Bruner dengan "*transfer of training*" siswa memiliki kemampuan untuk belajar sesuatu yang lain berdasarkan apa yang sudah diketahui dan dikuasainya

Goetz dan LeCompte (1984: 36-38) membagi teori atas empat jenis yaitu:

Grand theory

Theoretical models

Formal and middle-range theory

Grand theory (teori besar) adalah *sistem yang secara ketat mengkaitkan preposisi-preposisi dan konsep-konsep yang bastrak sehingga dapat digunakan, menguraikan, menjelaskan, dan memprediksi secara komprehensif sejumlah fenomena besar secara non-probabilitas*. Sebagai contoh teori Challenge dan response (Toynbee (1974), menjelaskan bahwa perkembangan peradaban umat manusia dalam empat masa yaitu kelahiran peradaban (*the geneses of civilizations*), pertumbuhan peradaban (*the growths of civilazations*), kemunduran peradaban (*the breakdowns of civilizations*), dan kehancuran peradaban (*the disintegrations of civilizations*). Toynbee lebih lanjut menjelaskan bahwa perkembangan kebudayaan itu didasarkan atas teori tantangan dan jawaban. Jika suatu peradaban mendapat tantangan dan jawaban yang sesuai maka ia akan berkembang tetapi jika tantangan itu lebih rendah atau terlalu tinggi dari kemampuan yang telah dimiliki peradaban tersebut maka peradaban tadi akan mengalami kemunduran untuk kemudian hancur.

Theoretical model (model teori), adalah *sebagai keterhubungan yang longgar (tidak ketat) antara sejumlah asumsi, konsep, dan preposisi yang membentuk pandangan ilmuwan tentang dunia*. Teori ini dipakai sebagai pendekatan dalam melihat, mengembangkan, dan memecahkan berbagai masalah yang diungkapkan, selain itu teori

ini digunakan bukan saja untuk menjelaskan tetapi secara operasional dipakai dalam mengembangkan berbagai aktivitas ilmiah

Formal and middle-range (teori formal dan tingkat menengah) yaitu sebagai *preposisi yang berhubungan yang dikembangkan untuk menjelaskan beberapa kelompok tingkah laku manusia yang abstrak*. teori ini terbatas ruang lingkupnya dibandingkan yang kedua di atas. Generalisasi yang dijadikan dasar untuk mengembangkan teori sudah bersifat universal tetapi keterikatannya dengan data empirik masih sangat kuat. Tapi teori-teori ini banyak dikembangkan dalam banyak studi. Para ilmuwan sosial mengembangkan tentang mobilitas sosial yang memiliki tingkat generalisasi yang luas. Tetapi bagaimanapun universalitas generalisasi yang dijadikan dasar masih terbatas dibandingkan dengan rekonstruksionisme sejarah atau fungsionalisme.

Generalisasi adalah suatu pernyataan yang dibentuk dari perpaduan atau gabungan dua konsep atau lebih. Bentuk pernyataan generalisasi itu dapat berupa; prinsip, hukum, dalil, dan pendapat. Konsep generalisasi dapat berkembang menjadi suatu teori, yaitu prinsip umum yang menjelaskan hakekat gejala atau hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah dan sebagainya.

Pentingnya siswa mempelajari konsep dan generalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Siswa akan memahami proses sosial yang terjadi di masyarakat.
- b. Siswa tidak mudah melupakan suatu konsep atau generalisasi karena diperoleh suatu pengertian dan pemahaman yang mendalam
- c. Konsep dan generalisasi yang telah difahami akan membuat suatu peristiwa lebih jelas kaitannya dengan peristiwa yang lainnya.

Bahan pelajaran IPS yang diajarkan di Sekolah Dasar bersumber dari konsep-konsep dasar dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial; seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial dan politik. Selain itu ada pula sumber belajar yang terdapat lingkungan, seperti lingkungan alam (fenomena alam) dan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya (fenomena manusia). Semuanya itu akan memberikan bahan atau materi terhadap pelajaran IPS yaitu berupa fakta, sikap, nilai, apresiasi seni dan budaya dan ide-ide. Setiap program pembelajaran IPS yang bersumber dari materi di atas harus berorientasi pada masyarakat, bangsa dan negara kita sendiri.

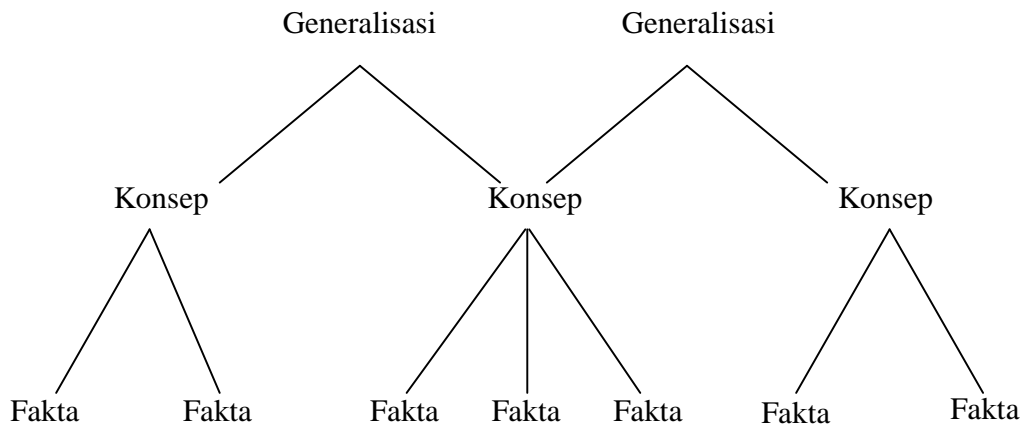
3. Fakta

Fakta, adalah suatu obyek, peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi pada saat ini, atau suatu jejak-jejak peristiwa yang pernah terjadi atau pernah ada pada masa yang lalu. Fakta dapat diperoleh manusia melalui penginderaan dan pengamatan. Penginderaan dan pengamatan setiap manusia itu berbeda-beda. Apabila ada fakta yang sama akan mengalami makna yang berbeda bagi dua orang manusia atau lebih, karena masing-masing manusia mempunyai kesan atau persepsi sendiri-sendiri. Dalam disiplin ilmu fakta memiliki kedudukan yang mendasar, yang menjadi penopang dalam menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori. Suatu disiplin ilmu tidak akan berkembang tanpa adanya fakta. Kesimpulan awal dalam proses berpikir keilmuan adalah untuk menghasilkan fakta. Hamid Hasan dalam Schunke (1988:18) mengatakan bahwa fakta adalah *building block* yang digunakan untuk mengembangkan

konsep dan generalisasi. Tanpa fakta tidak akan ada konsep dan tanpa konsep tidak akan ada generalisasi dan selanjutnya tidak akan ada teori.

Schunche (1988:19) menggambarkan keterhubungan antara fakta, konsep dan generalisasi sebagai berikut

Gambar.1 : Keterhubungan Generalisasi, Konsep, dan Fakta



Fakta adalah dasar dari pengetahuan yang dikembangkan manusia. Tanpa fakta disiplin ilmu-ilmu sosial tidak akan memiliki konsep. Sedangkan konsep adalah sesuatu yang sangat pokok dan menjadi kepedulian utama dalam ilmu-ilmu sosial., karena tanpa fakta ilmu-ilmu sosial tidak memiliki makna apa-apa. Para ilmuwan hanya dapat mengumpulkan data atau informasi dari lapangan, sedangkan fakta tidak pernah tersedia dan tidak dapat di kumpulkan langsung begitu saja dari lapangan. Data atau informasi itu diolah berdasarkan prosedur tertentu untuk menghasilkan fakta. Jadi fakta dihasilkan berdasarkan proses pengolahan dan atas pandangan tertentu.

Untuk melakukan suatu penelitian maka yang harus dikumpulkan lebih dulu adalah data atau informasi dari lapangan. Data yang diperoleh dari sumber di lapangan itu dapat melalui penglihatan atau pendengaran, setelah terkumpul kemudian diolah hasil olahan itu akan menghasilkan fakta. Fakta-fakta ini diperlukan untuk menentukan mana yang masuk atribut, dari atribut-atribut akan membentuk suatu konsep.konsep dirangkai dalam suatu hipotesis, dikembangkan menjadi generalisasi. Sifat rangkaian atau hubungan anatarkonsep tersebut dapat berupa hubungan korelatif, kausatif, atau pun konstruktif. Setiap disiplin ilmu akan berbeda fakta. Fakta tentang sejarah terdiri atas, nama pelaku, tempat peristiwa terjadi, tanggal, bulan dan tahun kejadian. Fakta tentang geografi, nama daerah, letak daerah, pantai , datar atau daerah pegunungan, bagaimana tingkat kesuburan tanahnya, dan sebagainya.

4. Materi Proses dalam Pendidikan Ilmu-ilmu sosial

Proses adalah berbagai prosedur, cara kerja, metode kerja tertentu dalam materi kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial yang harus dilaksanakan siswa di dalam kelas, dalam ruang tertentu, atau bahkan mungkin di luar lingkungan sekolah. Proses sangat

berguna untuk mengembangkan wawasan, keterampilan, dan berbagai kemampuan berpikir. Keterampilan yang paling utama adalah keterampilan kognitif bukan keterampilan psikomotor, dalam hal-hal yang berkenaan dengan pemanfaatan koordinasi kerja motorik keterampilan psikomotor diperlukan, jadi dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial keterampilan psikomotor bukan menjadi fokus utama. Dengan kemampuan, wawasan, keterampilan berpikir dan pelaksanaan teknis, apa yang dipelajari siswa bukan hanya sekedar mengetahui dan memahami saja tapi melatih siswa berkerja berdasarkan apa yang dikemukakan dalam materi tersebut.

Menurut Hamid Hasan, materi adalah proses dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan mencari sumber dan merumuskan informasi, mengolah informasi, mengembangkan baru berdasarkan apa yang sudah dimilikinya; memecahkan berbagai masalah dan mengambil keputusan.

Atas dasar sifat dan kemampuannya, materi kurikulum ini sangat handal untuk dimanfaatkan dalam pengembangan kemampuan yang berhubungan dengan tingkat kognitif tinggi. Selain itu sesuai dengan sifat materi tersebut maka siswa yang belajar proses harus memiliki pengalaman berbeda dari belajar materi substantif. Dalam hal ini siswa harus terlibat aktif dalam proses yang dipelajarinya. Ini artinya siswa harus belajar mengenai cara dan strategi dalam mengumpulkan informasi, sehingga siswa menjadi terampil dalam melakukannya.

Hamid Hasan, mengemukakan pula bahwa materi untuk proses belajar sebagian besar dikembangkan dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Untuk kemampuan berpikir maka cara melihat permasalahan, pemilahan masalah menjadi sesuatu yang dapat dikelola operasionalisasi masalah dari yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, cara pengolahan data menjadi fakta, kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan serta cara mengkomunikasikan hasil berpikir sangat ditentukan oleh warna dan ciri khas suatu disiplin ilmu. Dalam pendidikan disiplin ilmu yang memakai pendekatan terpisah, kekhasan setiap disiplin ilmu memang akan lebih menuntut perhatian untuk dikembangkan pada diri peserta didik dibandingkan kesamaan yang ada di antara disiplin-disiplin ilmu tersebut.

Materi proses yang dikembangkan meliputi berbagai keterampilan, seperti keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan atau bahkan melalui perantara berbagai alat komunikasi yang tersedia dalam masyarakat. Dengan keterampilan berkomunikasi memudahkan bagi siswa untuk mengemukakan pokok pikirannya atau pendapat kepada individu lain atau kelompok sosial yang menjadi kawan berkomunikasi. Kemampuan ini harus mendapat perhatian yang serius sebagai materi proses pendidikan disiplin ilmu-ilmu sosial. Materi pendidikan untuk proses berkembang dalam tingkat kesulitan antar jenjang pendidikan. Perkembangan tingkat kesulitan tidak didasarkan atas meluasnya ruang lingkup materi seperti yang terjadi pada materi substansi.

Perkembangan tingkat kesulitan juga terjadi karena kompleksitas proses yang harus dilakukan seperti juga kompleksitas kemampuan berpikir abstrak yang harus digunakan sejalan dengan peningkatan kompleksitas keterampilan yang diperlukan. Dalam hal yang terakhir ini kompleksitas materi substansi hanya berkenaan dengan kompleksitas kemampuan berpikir abstrak. Fiksasi prinsip yang melandasi suatu:

- Informasi
- Pengorganisasian informasi
- Kemampuan menarik berbagai kesimpulan
- Menggunakan informasi
- Penyampaian dikoran secara lisan dan tulisan
- Menemukan bentuk-bentuk baru
- Mengenal pokokpikiran lawan bicara
- Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah
- Mengembangkan hipotesis
- Pemecahan masalah
- Bekerja sama dalam kelompok
- Memberi keputusan

5. Sikap, Nilai, dan Moral

Sikap adalah kecenderungan psikologis seseorang terhadap benda, sifat, keadaan, pekerjaan, pendapat dan sebagainya. Hal ini akan berkembang setelah ia mengetahui tentang apa itu benda, sifat, pekerjaan, pendapat, dan sebagainya. Hal ini berarti, sikap hanya untuk sesuatu yang sudah dikenal dan bukan sesuatu yang belum pernah diketahuinya. Jadi sikap seseorang akan terungkap dalam pernyataan setuju, senang, sayang atau sebaliknya.

Nilai adalah sesuatu yang menjadi kriteria apakah suatu tindakan, pendapat, atau hasil kerja itu baik/positif atau jelek/negatif. Nilai pribadi bisa saja tidak sejalan dengan nilai masyarakat, tetapi bisa sejalan. Setiap orang dalam anggota masyarakat atau sebagai warga negara bertindak, berpikir, dan menghasilkan sesuatu berdasarkan nilai kejakinan dan diakui oleh masyarakat dan negara. Umpama nilai agama, tradisi yang berlaku dalam masyarakat atau negara, dan perjanjian yang ditetapkan baik secara terurat ataupun yang tersirat

Pertanyaan awal mengapa pendidikan ilmu-ilmu sosial perlu mengembangkan aspek sikap nilai dan moral ?. Hamid Hasan, mengemukakan bahwa ada 3 jawaban utama terhadap pertanyaan itu. *Pertama*, dalam setiap disiplin ilmu ketiga unsur itu ada, tidak ada disiplin ilmu yang bebas dari ketiga unsur tadi. Konsep bahwa ilmu adalah sesuatu yang bebas nilai sudah lama ditinggalkan orang (Nagel, 1961, Hasan, 1977, Lincoln dan Guba, 1985, Trigg, 1991, Schratz, 1993). Tidak ada disiplin ilmu yang bekerja dalam suasana *value and moral free*. Alasan *Kedua* berhubungan dengan kedudukan pendidikan ilmu-ilmu sosial sebagai wahana untuk menarik perhatian generasi muda sehingga mereka mau belajar ilmu-ilmu sosial di SMP harus menarik perhatian siswa agar mau belajar ilmu-ilmu sosial lebih lanjut. Pendidikan ilmu-ilmu sosial di SMA harus mampu menarik perhatian siswa agar mau melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi dalam ilmu-ilmu sosial.

Ketiga masih berhubungan dengan kedudukan pendidikan ilmu-ilmu sosial sebagai wahana pendidikan. Sebagai wahana pendidikan ia memiliki tugas mengembangkan kepribadian siswa yang utuh dan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat disini diartikan sebagai nilai dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, pendidikan ilmu-ilmu sosial memiliki kewajiban untuk mengembangkan nilai dan moral yang berlaku dalam masyarakat menjadi bagian dari kepribadian individu siswa. Melalui

cara yang demikian maka pendidikan ilmu-ilmu sosial memberikan kontribusi tidak hanya untuk kepentingan dirinya (keilmuan) tetapi juga untuk kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan tugas itu melalui rumusan tujuan pendidikan nasional, undang-undang, maupun keputusan-keputusan tentang pendidikan yang lebih operasional. Pengembangan sikap, nilai, dan moral sebagai tujuan dari pendidikan ilmu-ilmu sosial dapat dirumuskan sesuatu dengan materi nilai dan moral yang ada dalam disiplin ilmu maupun dalam masyarakat. Sebagai contoh : kebenaran, sikap kritis, hormat terhadap logika, penghargaan terhadap fakta, penghargaan terhadap pendapat orang lain adalah suatu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam ilmu. Kebiasaan belajar adalah nilai yang akan dikembangkan dalam masyarakat; seperti juga halnya dengan kepatuhan terhadap aturan, kepatuhan terhadap orang tua, penghargaan terhadap prestasi, rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan sebagainya.

Moral terdapat pula dalam ilmu dan masyarakat. Dalam ilmu, kejujuran adalah sesuatu yang dijunjung sama tingginya dengan penyebarluasan hasil penemuan. Seorang ilmuwan yang tidak jujur melaksanakan penelitian akan mendapat hukuman dari masyarakat ilmuwan. Hasil-hasil karyanya tidak akan dipercaya lagi dan kariernya sebagai ilmuwan dapat dikatakan berhenti. Moral dalam masyarakat dan bangsa dapat dikatakan sangat bervariasi; setiap masyarakat dan bangsa memiliki moral tertentu. Diantara moral yang dianut suatu kelompok masyarakat atau bangsa mungkin saja ada persamaan-persamaan dan dengan demikian bersifat universal. Pada saat sekarang secara universal diakui bahwa pelecehan ras dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Sebagai seorang guru, apakah itu guru IPS atau guru bidang studi lainnya mempunyai tanggung jawab moral terhadap anak didiknya. Karena ini adalah tugas negara yang dibebankan kepada ibu bapak guru untuk memanusiaikan manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Guru bukan saja bertugas sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik tetapi juga sebagai pendidik, yang artinya sangat luas dibanding dengan sebagai pengajar.

Sikap, nilai, dan moral yang dapat dikembangkan pendidikan ilmu-ilmu sosial adalah :

- Pengetahuan dan pemahaman tentang nilai dan moral yang berlaku dalam masyarakat seperti religiusitas, penghormatan terhadap keteladanan, prestasi, sifat kepedulian sosial, menghormati orang tua, kepedulian terhadap tetangga, dan sebagainya.
- Toleransi
- Kerjasama/gotong royong
- Hak azasi manusia

Hamid Hasan, mengemukakan bahwa materi untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial yang menjadi wahana pengembangan sikap, nilai, dan moral dapat dikembangkan dari materi disiplin ilmu-ilmu itu sendiri dan dapat pula dikembangkan berdasarkan nilai, sikap dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Seperti telah dikemukakan dalam bahasan mengenai konsep di dalam sub-sub ini maka, nilai, norma, dan moral sebenarnya adalah konsep-konsep utama dalam sosiologi dan antropologi. Oleh karena itu pemahaman mengenai nilai, norma dan moral tertentu dapat dilakukan melalui kajian yang dari sudut pandang keilmuan. Meskipun demikian, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa suatu konsep memiliki materi dan materi itu dikembangkan dari kenyataan hidup dalam masyarakat. Untuk nilai, norma, dan moral yang ditentukan keberlakuannya dalam masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan apakah suatu isi

suatu nilai, norma, dan moral dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari ataukah tidak ada kesesuaian dengan apa yang berlaku dalam masyarakat. Jika ia tidak sesuai dengan apa yang berlaku dalam masyarakat maka apakah ketidaksesuaian itu dianggap sebagai pengembangan isi nilai, norma, atau moral yang berlaku ataukah sebagai sesuatu yang membahayakan.

Jika dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengembangkan yang sudah ada, maka kemungkinan ia diterima masyarakat lebih besar dibandingkan, sebaliknya. Oleh karena itu, sikap yang akan dikembangkan terutama adalah sikap yang positif terhadap disiplin ilmu, nilai, norma, dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Sikap yang positif terhadap disiplin ilmu merupakan tujuan yang sepantasnya dikembangkan oleh setiap pengajar disiplin ilmu-ilmu sosial. Melalui pengembangan yang demikian guru berupaya agar siswa tertarik dan mau belajar terus tentang disiplin ilmu yang bersangkutan. Seperti telah dikemukakan terdahulu materi untuk pengembangan sikap yang demikian sepenuhnya dikembangkan dari materi disiplin ilmu itu sendiri serta sikap guru dalam mengembangkan proses belajar.

Nilai dan moral menurut Hamid Hasan adalah nilai dan moral yang diterima oleh masyarakat, etnis, dan bangsa tertentu. Dalam hal ini pendidikan ilmu-ilmu sosial harus berhati-hati dan sampai mengulang secara tidak perlu materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang berasal dari Pendidikan seperti nilai 36 butir dari Ekaprasetya Pancakarsa tidak dapat dijadikan materi pendidikan ilmu-ilmu sosial begitu saja. Secara resmi materi tersebut adalah materi pendidikan Pancasila. Meskipun demikian untuk kepentingan pendidikan berbagai materi tersebut dapat diambil untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Untuk memilih materi apa yang dapat dikembangkan pendidikan ilmu-ilmu sosial maka tujuan pendidikan ilmu-ilmu sosial dan materi disiplin ilmu sosial dapat digunakan sebagai pegangan. Misalnya materi sosiologi dan antropologi yang berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam kebudayaan dikenal adanya berbagai etnis yang berbeda satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu maka materi yang sifatnya demikian memungkinkan pembahasan sikap hormat menghormati antara etnis tersebut. Demikian pula pembahasan mengenai nilai yang harus dikembangkan berhubungan dengan adanya berbagai etnis tersebut di mana setiap kelompok etnis memiliki nilai sosial dan budaya yang mungkin berbeda satu sama lainnya.

Contoh lain misalnya yang berhubungan dengan rasa cinta tanah air. Materi yang sesuai untuk mengembangkan sikap dan bahkan menjadikannya sebagai nilai hidup seorang peserta didik untuk hal demikian adalah materi disiplin sejarah. Untuk mengembangkan sikap, dan nilai cinta tanah air guru dapat pula dengan melalui kajian mengenai pergerakan kebangsaan yang dialami bangsa Indonesia.

Cara pengembangan materi disiplin ilmu-ilmu sosial yang berhubungan untuk mencapai tujuan dalam dimensi ini tentu harus dibedakan dari cara pengembangan materi yang dilakukan dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial, materi tersebut harus dikembangkan berdasarkan pemikiran logis dan tidak dogmatis. Dari pemikiran logis itu siswa harus dapat diyakinkan akan pentingnya sikap, nilai, atau moral yang demikian, jadi bukan atas dasar pertimbangan keputusan atau produk hukum resmi yang mengharuskan pengembangan materi yang demikian. Memang tugas pengembangan materi dengan dasar landasan pemikiran yang logis dan

akademis untuk diarahkan ke sesuatu yang akan dikembangkan sebagai milik seseorang secara afektual memerlukan upaya yang lebih keras tetapi harus dilaksanakan.

Dalam kenyataan kurikulum materi yang bersifat sikap, nilai, dan moral dapat dikatakan tidak tercantum secara tersurat. Misalnya jika dilihat kurikulum SMA untuk pelajaran Antropologi maka tercantum pokok bahasan bentuk-bentuk kebudayaan. Dibagian uraian terbaca bahwa pokok bahasan tersebut meliputi bangunan, seni rupa, tulisan, seni sastra, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Materi ini dikembangkan dari disiplin ilmu tersebut dan karena itu masalah sikap, nilai, dan moral tidaklah tercantum masalah sikap, nilai dan moral tidaklah tercantum secara tersurat.

Dengan demikian guru pendidikan ilmu-ilmu sosial harus mampu mengidentifikasi (menemutunjukkan) sikap, nilai, dan bahkan moral yang dapat dikembangkan.. Umpunya dari materi pokok bahasan bentuk-bentuk kebudayaan ini dapat dikembangkan sikap menyenangkan dan memberikan penghargaan terhadap apa yang sudah dihasilkan masyarakat, individu atau anggota masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk bangunan yang ada, seni rupa yang sudah dihasilkan, teknologi yang telah dikembangkan, atau pun ilmu pengetahuan yang sudah mendarah daging dengan pokok bahasan antropologi. Dalam potensi sumber daya alam Indonesia untuk pendidikan geografi maka dapat diidentifikasi/ditemutunjukkan materi untuk sikap terhadap pelestarian alam. Alam selain berguna dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia, juga harus dipelihara supaya tidak ruksak artinya harus ada keseimbangan. Contoh yang sering kita dengar baik di media massa atau media elektronik, seringnya banjir diberbagai tempat atau daerah yang dampaknya adalah merugikan manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. harus diakui bahwa pendidiklah yang bertanggung jawab dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial harus bekerja lebih keras sebab ini adalah suatu tantangan professional.

Namun tidak setiap pokok bahasan dapat dikembangkan materi untuk sikap, nilai atau moral. Mungkin dari suatu dari suatu pokok bahasan tidak ada atau tidak cukup kuat dijadikan dasar untuk mengembangkan sikap, nilai, moral atau salah satu dari ketiganya. Sebagai contoh, misalnya pokok bahasan mengenai tujuan, sasaran, metode ekonomi. Dari pokok bahasan seperti ini tidak perlu dikembangkan adanya suatu sikap, nilai, atau moral. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian terbesar pokok bahasan pendidikan ilmu-ilmu sosial berhubungan dengan masyarakat terdapat pula sejumlah pokok bahasan yang tidak punya kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pokok bahasan yang demikian tidak perlu dipaksakan untuk menghasilkan materi yang ada hubungannya dengan sikap, nilai, dan moral.

Materi yang bersifat sikap, nilai, dan moral memberikan kesempatan kepada guru pendidikan ilmu-ilmu sosial untuk bekerja secara professional. Sebagai pengembang kurikulum di sekolah atau untuk kelas, ia harus berfikir keras untuk mengkaji pokok bahasan dalam kurikulum. Kemampuan untuk menemukan sikap, nilai, dan moral dari pokok bahasan yang tersedia dalam GBPP suatu kurikulum memang harus mendapat binaan yang mendasar. Hanya dengan bekal yang demikian guru dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Sekuensi Materi Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Sekuensi materi adalah tata urutan antara suatu materi dengan materi lain; dalam bahasa GBPP tata urutan antara pokok bahasan. Dalam konteks kurikulum yang lebih luas sekuensi dapat berkenaan dengan tata urutan antara satu mata pelajaran lainnya. Konteks yang terakhir ini bukanlah konteks dimana semua guru terlibat dan bahkan dapat dikatakan tidak terlibat sama sekali dan oleh karena itu tidak dibicarakan di sini.

Konteks pertama menyangkut pekerjaan guru sehari-hari walaupun GBPP sudah mencantumkan urutan tersebut. Sebagai pengembang kurikulum guru diberi kebebasan oleh kurikulum nasional untuk mengatur kembali tata urutan yang berlaku: asalkan masih dalam satu semester atau dalam satu catur wulan yang sama. Artinya guru masih memiliki tanggungjawab untuk menentukan apakah sekuensi yang telah ditetapkan pengembang kurikulum tingkat pusat sudah dianggapnya memadai atautkah masih harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi setempat.

Secara sederhana tata urutan itu dapat dikelompokkan atas dua pendekatan yang besar. Pertama, pendekatan logis yang berasal dari disiplin ilmu. Pendekatan kedua, adalah pedagogis. Kedua pendekatan itu tidak harus bertentangan satu dengan lainnya tetapi keduanya dikembangkan dari tradisi dan landasan pemikiran yang berbeda.

Pendekatan logis adalah pendekatan berdasarkan pemikiran logis suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu tata aturan materi dilakukan berdasarkan urutan itu. Dalam sejarah misalnya urutan logis adalah urutan kronologis progresif, artinya materi pendidikan sejarah disusun berdasarkan urutan waktu dari masa yang paling tua ke masa yang paling muda. Oleh karena itu pendidikan sejarah dimulai dengan membahas pra-sejarah, zaman kuno atau zaman tua, zaman madya dan seterusnya sampai ke zaman yang paling muda.

Tata urutan materi disiplin ilmu lainnya demikian pula. Walaupun orang banyak menyatakan bahwa tata urutan logis materi pendidikan ilmu-ilmu sosial tidak sekuat tata urutan logis dalam pendidikan ilmu-ilmu alamiah tetapi tata urutan logis pendidikan ilmu-ilmu sosial tetap harus diperhatikan. Apabila kemampuan berfikir yang akan dikembangkan pendidikan ilmu-ilmu sosial keterhubungan antara satu materi dengan materi lainnya menjadi sangat penting dan tampak tidak dapat diabaikan. Kesan yang disampaikan umum mengenai pendidikan ilmu-ilmu sosial itu terjadi karena kepedulian pendidikan ilmu-ilmu sosial yang tinggi pada pengembangan aspek ingatan.

Contoh, berikut ini akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam alinea diatas. Misalkan pembahasan mengenai pemerintahan yang berdaulat. Adalah sesuatu yang sukar atau dapat dikatakan tidak mungkin seseorang dapat mengembangkan pemahaman dan kemampuan intelektual tinggi lainnya dari materi pemerintahan yang berdaulat apabila ia tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengertian negara serta hukum internasional yang mengatur keberadaan suatu negara. Seseorang dapat saja belajar sendiri mengenai hal-hal yang dikemukakan terakhir untuk kemudian mengembangkan pengertiannya mengenai pemerintahan yang berdaulat tetapi hal itu menunjukkan bahwa persyaratan pemahaman terhadap pengertian negara dan hukum internasional tentang negara diperlukan. Artinya sekuensi materi yang dipelajari diperlukan.

Untuk mengembangkan sekuensi antar pokok bahasan yang sudah ditetapkan dalam GBPP, guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman disiplin ilmu yang diajarkan dan materi pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Tanpa pengetahuan dan kemampuan yang demikian maka ia akan mengalami banyak kesulitan atau bahkan

tidak mungkin sama sekali untuk melakukan tata urutan selain menerima begitu saja apa yang sudah ditetapkan dalam GBPP. Dengan demikian ia kurang dapat melaksanakan fungsi profesionalnya sebagai pengembang kurikulum dan hanya menjadi mesin pelaksana kurikulum. Apabila ia menerima sekuensi dalam GBPP berdasarkan keyakinan profesionalnya bahwa apa yang sudah diterapkan dalam GBPP itu adalah apa yang menjadi keyakinannya maka ia tetap melakukan profesinya dengan baik; ia tetap menjadi pengembang kurikulum yang profesional dan tidak menjadi mesin pelaksana kurikulum.

Sekuensi logis dikembangkan berdasarkan keterhubungan logis antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Hubungan logis yang dimaksudkan adalah hubungan mana yang dianggap harus dikuasai lebih dahulu untuk dapat menguasai materi berikutnya secara lebih baik. Persoalan ini seringkali tidak mudah karena tidak jarang bahwa dalam diri pribadi guru terjadi perbedaan mengenai posisi satu pokok bahasan dibandingkan pokok bahasan lain. Hal itu terjadi sebagai akibat keterhubungan yang sangat erat antara materi satu pokok bahasan dengan lainnya. Misalnya akan agak sulit untuk menentukan mana yang lebih dulu harus dibicarakan antara uang dan harga. GBPP mencantumkan bahwa harga dibicarakan lebih dulu. Seorang guru dapat saja berdiskusi dengan teman sejawat mengenai mana yang harus dibahas lebih dulu, dan teman sejawat mungkin ada yang berpendapat bahwa uang harus dibahas dulu sedangkan yang lain harga. Dalam hal semacam ini maka guru dapat berpegang pada pertimbangan mengenai apa yang sudah /akan dipelajari sebelumnya. Jika, pokok bahasan sebelumnya lebih dekat dengan harga maka harga menjadi lebih dulu dari uang.

Adakalanya sekuensi itu dengan mudah dapat dilakukan karena jelasnya perbedaan antara yang satu dengan lainnya dan keterhubungan yang jelas menggambarkan satu harus lebih dulu diketahui. Misalnya antara penduduk dengan warganegara maka penduduk lebih jelas untuk dibicarakan lebih dahulu. Dalam hal yang demikian guru tidak perlu mengerahkan seluruh kemampuannya tetapi ia tetap harus menggunakan pertimbangan profesionalnya betapa pun rendah kadarnya.

Sekuensi yang berdasarkan kependidikan lebih ditekankan pada pertimbangan mengenai siswa dan bukan tata urutan yang ada dari disiplin ilmu. Dalam hal ini kriteria seperti kemudahan, familiarisasi dengan pokok bahasan, serta tingkat abstrak suatu materi pokok bahasan dijadikan dasar pertimbangan. Misalnya, untuk membahas pokok bahasan penduduk dan warga negara. Penduduk bagi siswa lebih jelas dan dekat dengan dirinya sedangkan warganegara adalah suatu konsep yang lebih abstrak. Seseorang yang menjadi penduduk suatu daerah atau negara mudah dikenal dari kehadirannya tetapi tidak demikian halnya dengan warganegara. Seorang warganegara Indonesia mungkin lebih banyak tinggal di luar negeri dibandingkan di Indonesia.

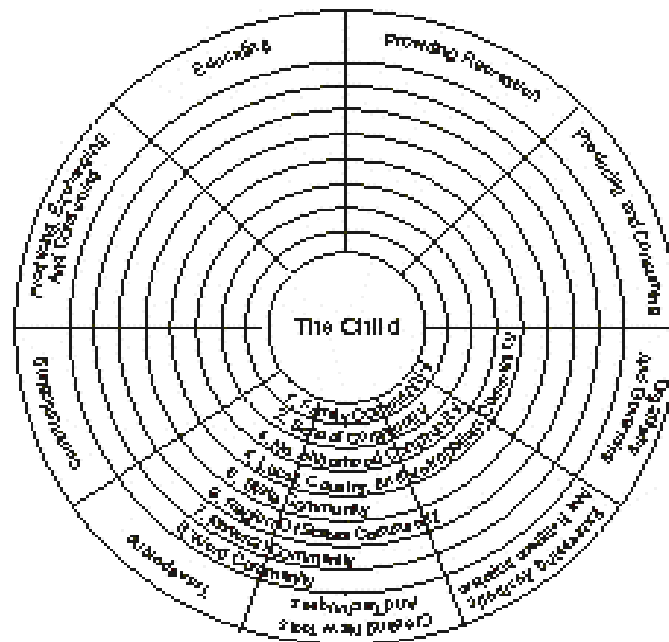
Berdasarkan ketiga kriteria diatas maka sekuensi pedagogik sering dimulai dari lingkungan terdekat dengan siswa dan berkembang ke lingkungan terjauh. Dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial model yang demikian dikenal dengan nama *expanding community approach* (pendekatan komunitas yang meluas). Dalam bentuk aslinya, Paul Hanna (1972) tokoh yang mengembangkan model ini, menggunakan *pendekatan komunitas yang meluas* untuk pendidikan yang bukan bersifat pendidikan disiplin ilmu. Paul Hanna melaporkan mengenai model ini pada tahun 1963 dalam jurnal *Social Education* dan model tersebut digunakan untuk pendidikan sosial yang mempersiapkan siswa terutama untuk berkiprah dalam masyarakat sebagai anggota biasa suatu

masyarakat dan bukan sebagai calon untuk dididik sebagai ilmuwan atau tenaga kerja tingkat perguruan tinggi.

Model Hanna tersebut adalah seperti yang digambarkan dalam gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut jelas diperlihatkan bahwa siswa (*the child*) adalah pusat dari semua proses belajar dan bukan disiplin ilmu. Pembahasan mengenai materi pendidikan atas pusat ini. Tema-tema yang dianggap penting oleh Hanna (1972) adalah tema yang dikembangkan dari kehidupan masyarakat dan bukan dari disiplin ilmu walaupun ada persamaan dengan konsep-konsep dalam disiplin ilmu seperti transportasi dan konversi.

Keseluruhannya ada sembilan tema yang dirumuskan dalam bentuk aktivitas dan tidak menggunakan kata benda yang umum. Kesembilan tema itu adalah proses pendidikan (*educating*), penyediaan rekreasi (*providing recreation*), perlindungan dan pengkonversian (*protecting and preserving*), pengorganisasian dan pemerintahan (*organizing and governing*), menyatakan keindahan dan semangat keagamaan (*expressing aesthetic and religious impulses*), penciptaan alat-alat dan teknik-teknik baru (*creating new tools and techniques*), pentransportasian (*transporting*), berkomunikasi (*communication*), memproduksi, penukaran, dan pengkonsumsian (*producing, exchanging, and consuming*).

Gambar.2 : Model Perluasan Komunitas Hanna



Siswa belajar mengenai kesembilan tema itu dari lingkungan terdekat dengan dirinya kemudian berkembang ke komunitas keluarga (*family community*); sekolah (*school community*), tetangga (*neighbourhood community*); lingkungan/desa, kecamatan, kotamadya/kabupaten (*local, country, and metropolitan community*); propinsi (*state*); wilayah propinsi (*region of states community* = dapat disebut dengan pulau ataupun

wilayah waktu untuk situasi di Indonesia); nasional (*national community*); dan dunia (*world community*).

Untuk memanfaatkan model Hanna ini bagi pendidikan ilmu-ilmu social beberapa perlu dilakukan, terutama dengan menghilangkan salah satu komponen sekuensinya. Unsur sekuensi Hanna yang tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan disiplin ilmu adalah tema kehidupan yang digunakannya. Oleh karena itu perbaikan terhadap model Hanna dengan menghilangkan kesembilan bidang kehidupan tersebut. Sebagai gantinya, digunakan konsep atau topik yang dikembangkan dari disiplin ilmu.

Perbaikan terhadap model tersebut menyebabkan keterhubungan antar kedua komponen model tidak dipertahankan. Dalam model Hanna proteksi dan konvensi dikembangkan sebagai materi bahasan sejak dari lingkungan rumah sampai ke lingkungan dunia. Dalam perbaikan keadaan sudah tidak demikian. Pokok bahasan yang ada tidak lagi dibahas dalam keseluruhan konteks lingkungan yang berkembang. Ini terjadi karena tidak semua konsep keilmuan yang dipilih sebagai pokok bahasan mengandung pembahasan yang dapat dilakukan dalam berbagai jenjang lingkungan.

Perbaikan model Hanna terlihat misalnya dalam sekuensi materi kurikulum IPS di SMP 1984. Dalam kurikulum tersebut pokok bahasan kehidupan social, ekonomi dan budaya tidak dikembangkan dari lingkungan terdekat dengan siswa hingga ke lingkungan dunia. Ketiga pokok bahasan tersebut hanya dibahas dalam konteks wilayah Indonesia. Demikian pula dengan pokok bahasan penduduk tidak dimulai dari apa yang ada di sekitar siswa walaupun pokok bahasan ini diberikan di awal masa pendidikan SMP. Dalam kurikulum IPS SMP yang akan datang dilakukan perbaikan lagi. Unsur perkembangan lingkungan semakin mendapat perhatian tetapi unsur dimensi kehidupan Hanna tetap tidak digunakan. Hal ini dapat dimengerti mengingat adanya perbedaan tujuan yang mendasar antara apa yang ingin dicapai Hanna melalui *social studies* dengan apa yang ingin dicapai oleh IPS SMP. Hanna mengembangkan modelnya dengan tujuan yang bukan diarahkan pada pendidikan disiplin ilmu sedangkan pendidikan IPS SMP di Indonesia di arahkan sebagai pendidikan disiplin ilmu.

Perbaikan terhadap model tersebut menyebabkan keterhubungan antar kedua komponen model tidak lagi dipertahankan. Dalam model hanna proteksi dan kovensi dikembangkan sebagai materi bahasan sejak dari lingkungan rumah sampai ke lingkungan dunia. Dalam perbaikan keadaan sudah tidak demikian. Pokok bahasan yang ada tidak lagi dibahas dalam keseluruhan konteks lingkungan yang berkembang. Ini terjadi karena tidak semua konsep keilmuan dipilih sebagai pokok bahasan mengandung pembahasan yang dapat dilakukan dalam berbagai jenjang lingkungan. Misalnya dalam sekuensi kurikulum IPS di SMP tahun 1984. dalam kurikulum tersebut pokok bahasan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya tidak dikembangkan dari lingkungan terdekat dengan siswa hingga ke lingkungan dunia. Ketiga pokok bahasan tersebut hanya dibahas dalam konteks Indonesia

Pengorganisasian Materi

Hamid Hasan, mengemukakan bahwa pengorganisasian materi membahas mengenai bagaimana materi yang ada diatur sehingga ia merupakan suatu kesatuan wilayah yang utuh. Pengorganisasian materi amat penting dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial. Ia demikian pentingnya sehingga dalam pandangan tertentu pengorganisasian materi ini bahkan dikenal sebagai jenis kurikulum atau juga ada yang menyebutkan jenis

pendidikan ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu orang sering mengatakan bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial yang ini adalah yang terpisah (*separated*), korelasi (*correlated*), antardisiplin (*interdisciplinary*), dan fusi (*integrated*). Keempat jenis pengorganisasian pendidikan ilmu-ilmu sosial yang sepenuhnya termasuk kedalam pendidikan disiplin ilmu. Keempatnya akan dibahas dalam bagian bab ini.

1. Pengorganisasian Terpisah

Bentuk pengorganisasian terpisah adalah bentuk pengorganisasian materi kurikulum tertua. Dalam pengorganisasian kurikulum yang demikian, setiap disiplin ilmu-ilmu sosial diajarkan secara terpisah berdasarkan ciri dan karakteristiknya masing-masing. Dalam organisasi ini sejarah diajarkan terlepas dari geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi atau politik. Materi yang harus dipelajari siswa sepenuhnya dikembangkan dari masing-masing disiplin ilmu yang bersangkutan. Dulu belajar tentang sejarah ada sejarah dunia, ada sejarah Indonesia.

Bentuk pengorganisasian kurikulum yang demikian memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya ialah siswa belajar sepenuhnya terpusat pada satu disiplin ilmu. Ketika ia belajar sejarah seluruh perhatiannya terpusatkan pada sejarah saja. Ketika ia belajar geografi seluruh perhatiannya terpusat pada geografi; demikian pula seterusnya pada waktu siswa belajar disiplin ilmu lainnya. Ia memiliki seluruh waktu hanya untuk memusatkan pemikiran pada masalah yang ada dalam disiplin ilmu itu. Kompleksitas permasalahan dan cara pemecahan masalah sepenuhnya dikaji dari pemikiran keilmuan disiplin yang bersangkutan.

Pengembangan tujuan dan materi pelajaran pun menjadi lebih mudah bagi guru pendidikan ilmu-ilmu sosial. Seseorang yang mendalami sejarah hanya akan memikirkan tujuan dan materi sejarah bagi kelas yang menjadi tanggungjawabnya. Guru geografi hanya akan berfikir untuk mengembangkan tujuan dan materi yang sepenuhnya diambil dari geografi; dan demikian pula dengan pendidikan disiplin ilmu sosial lainnya. Apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya tidak perlu diperhatikan.

Kelemahan dari organisasi kurikulum yang demikian ialah ia menjadikan ilmu-ilmu sosial sebagai suatu pendidikan yang hanya memikirkan kepentingan disiplin ilmu. Faktor anak didik dan kenyataan kehidupan riil tidak termasuk pertimbangan. Dalam pendekatan yang demikian, siswa mungkin belajar sesuatu yang sangat berjauhan antara pokok bahasan suatu pelajaran dengan pelajaran lainnya pada hari yang sama dan hanya berbeda dalam beberapa menit saja. Lagi pula, siswa tidak diajak untuk melihat masalah sosial yang menjadi objek kajian disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai suatu kesatuan utuh. Siswa diharuskan melihat fenomena sosial sebagai suatu yang sepenuhnya sosiologis, antropologis, geografis, ekonomis, historis, atau lainnya. Sejak awal siswa sudah diajak berfikir terpisah untuk fenomena sosial yang sebenarnya satu. Akibatnya, fenomena itu dapat dikaji dengan baik secara akademik tetapi tidak cukup kuat sebagai dasar untuk memecahkan masalah sosial.

Kelemahan yang dikemukakan diatas mungkin tidak begitu terlihat apabila pandangan pendidikan ilmu-ilmu sosial didasarkan atas pandangan esensialisme. Kemampuan intelektual melalui pendidikan disiplin ilmu yang ketat memang memang menjadi pola pikir pandangan esensialisme. Kenyataan itu akan lain apabila pandangan yang dianut bahwa siswa juga diminta untuk mengembangkan kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di sekitar dirinya. Dalam pandangan

pendidikan di Indonesia, sesuai dengan apa yang tersirat dalam GBHN dan Undang-undang no 2 tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional maka pendidikan adalah upaya untuk mewariskan budaya, mengembangkan kemampuan intelektual serta untuk mendidik siswa agar mampu berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dan permasalahan sosial. Dengan demikian pandangan pendidikan yang dianut adalah elektik dari perennial, esensial, dan rekonstruksi sosial.

Dalam pandangan yang demikian maka pendidikan ilmu-ilmu sosial tidak dapat melepaskan diri hanya dengan memperhatikan kepentingan disiplin ilmu semata. Kepentingan anak didik serta masyarakat harus diperhatikan pula. Konsekuensi pandangan yang demikian adalah pendidikan disiplin ilmu-ilmu sosial di jejang pendidikan SMP maupun SMA harus memperhatikan kepentingan belajar siswa dan masyarakat. Tampaknya, pendidikan disiplin ilmu yang terpisah hanya sesuai untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi.

2. Pengorganisasian Korelatif

Pengorganisasian materi berikutnya adalah pengorganisasian korelatif. Pengorganisasian ini tidak menghilangkan ciri dari disiplin ilmu yang bersangkutan. Pendidikan sejarah sebagai suatu keutuhan tetap saja dipertahankan; seperti halnya dengan pendidikan geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi dan tata negara. Pengorganisasian ini hanya mencoba mencari keterkaitan pembahasan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya.

Melalui keterkaitan itu siswa belajar mengenai satu pokok bahasan dari suatu disiplin ilmu berhubungan dengan pokok bahasan lain dari disiplin ilmu lainnya. Pokok bahasan yang dibicarakan pada hari yang sama memang berbeda tetapi mereka memperlihatkan hubungan yang jelas. Dalam keadaan yang demikian prinsip keterkaitan yang dikehendakidalam belajar yang dikemukakan Piaget (Sigel dan Cocking, 1977) dan Ausuble (Ausuble dan Robinson, 1977) terpenuhi dengan baik.

Dalam pengorganisasian yang bersifat korelatif, pengembangan materi setiap disiplin ilmu lebih sulit. Tim yang mengembangkan materi kurikulum maupun materi pengajaran harus kompak: mereka harus membicarakan apa yang telah mereka kembangkan dan bagaimana keterhubungan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Sebagai contoh misalkan sejarah membicarakan peristiwa Rengasdengklok maka geografis membahas mengenai propinsi Jawa Barat. Pada waktu yang sama antropologi membahas mengenai nilai yang berlaku dalam hubungan antara orang yang dianggap tua dengan yang dianggap muda. Pokok bahasan antropologi ini akan membantu siswa dapat memahami bagaimana hubungan antara tokoh Soekarno-Hatta yang dianggap tua dengan golongan muda pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan.

Dalam pengorganisasian yang bersifat korelatif dalam sub-bab C yang berjudul sekuensi materi. Dalam bagian ini akan dibahas dua pendekatan utama dalam sekuensi materi pendidikan ilmu-ilmu sosial yaitu pendekatan logis keilmuan dan pendekatan pedagogis. Perbedaan dalam bandingan keuntungan dan kerugian masing-masing pendekatan dibahas dalam sub-bab C ini.

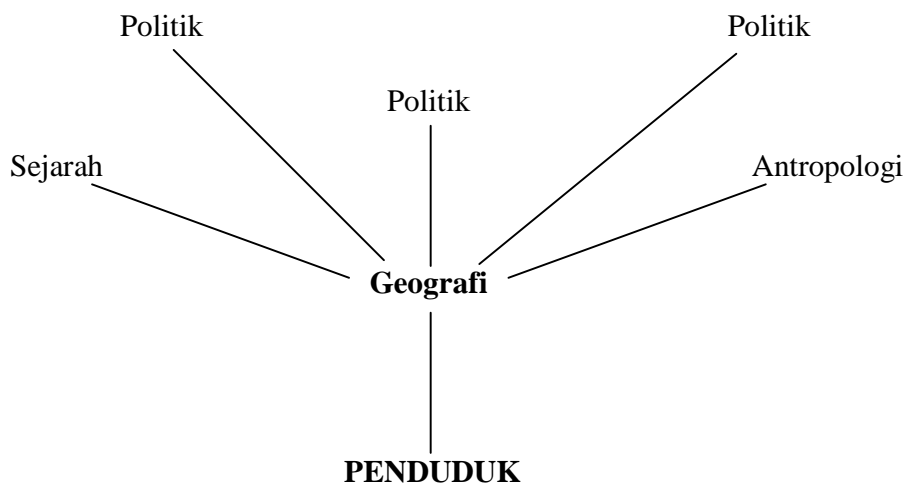
Sub-bab D akan membahas mengenai organisasi materi dan pandangan disiplin ilmu. Dalam bagian ini akan dibahas kembali organisasi terpisah, korelatif, integrative yang sudah dikemukakan sepintas dalam ada dua pendekatan yang digunakan. Pertama

adalah pendekatan berbagai antardisiplin/*interdisciplinary* dan kedua adalah pendekatan berbagai disiplin/*multidisciplinary*. Kedua pendekatan ini menggunakan lebih dari satu disiplin ilmu tetapi dalam pendekatan antardisiplin ada satu disiplin ilmu yang dijadikan sumber materi utama sedangkan disiplin ilmu lainnya diajdikan sebagai sumber untuk menambah kedalaman atau keluaasan materi tadi.

Misalkan dari geografi dikembangkan materi kajian utama mengenai kependudukan (lihat gambar) sedangkan materi disiplin ilmu sosial lainnya sebagai materi perluasan dan pendalaman, misalnya dari sejarah dibicarakan perkembangan penduduk dari masa sebelumnya; dari sosiolog dibicarakan mengapa pertambahan penduduk berdasarkan status sosialnya; sedangkan dari ekonomi dibahas mengenai konsekuensi dari pertambahan penduduk yang dihubungkan dengan penyediaan lapangan kerja, produksi, konsumsi serta pendapatan nasional. Pokok bahasan dari disiplin penunjang dikembangkan berdasarkan keperluan materi pokok bahasan utama. Oleh karena itu sekuensi materi pokok bahasan tidak berdasarkan tata urutan keilmuannya tetapi ia mengikuti tata urutan materi disiplin utama. Materi disiplin lain dikembangkan sebagai dukungan pendalaman terhadap materi utama.

Kedudukan disiplin geografi dalam contoh diatas adalah sebagai disiplin utama. Disiplin lain bersifat membantu dan kedudukannya adalah menyumbang terhadap apa yang diperlukan disiplin utama.kedudukan yang dibicarakan disini adalah kedudukan disiplin ilmu yang bersangkutan terhadap masalah. Suatu disiplin dikatakan memiliki kedudukan utama jika ia langsung berhubungan dengan masalah dibahas sedangkan dalam kedudukan yang menyumbang maka suatu disiplin tidak langsung berkaitan dengan masalah tetapi ia menjadi penyumbang bagi disiplin utama dalam melakukan kajian terhadap masalah. Ambar berikut ini memperlihatkan keterhubungan tersebut. Dalam gambar ini permasalahan penduduk dijadikan pokok bahasan contoh. Untuk membahas pokok bahasan tersebut maka disiplin geografi dijadikan disiplin utama sedangkan disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dijadikan disiplin pendukung. Disiplin geografi menggunakan keseluruhan teori dan konsep geografi untuk digunakan membahas permasalahan kependudukan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, disiplin geografi meminta bantuan dari berbagai konsep dari disiplin lain yang berkaitan dengan masalah kependudukan.

Gambar. 3 : Pendekatan Pengajaran Inter Disiplin



Gambar diatas hanya sebagai contoh. Dalam situasi lain yang menjadi disiplin utama dapat berganti dari geografi ke disiplin lainnya. Pemilihan mana yang menjadi disiplin utama tidak sulit karena disiplin utama adalah disiplin yang berkaitan secara keilmuan dengan masalah yang dikemukakan. Dalam aplikasinya di kurikulum SMA 1994 maka disiplin utama adalah disiplin yang sedang diajarkan guru. Jika guru tersebut mengajarkan sosiologi maka disiplin utamanya adalah sosiologi dengan pokok bahasan sosiologi pula.

Pembahasan yang menggunakan pendekatan antardisiplin memang akan memberikan kedalaman pengetahuan dan wawasan siswa yang belajar pendidikan ilmu-ilmu sosial. Berbagai dimensi dari persoalan penduduk dibahas secara seksama sehingga siswa dapat menemukan persoalan dasar dari masalah kependudukan. Pendekatan yang demikian meminta kemampuan siswa untuk berfikir meluas dan mendalam. Oleh karena itu pendekatan semacam ini memerlukan ketekunan dan penguasaan materi yang sangat baik serta kelincahan berfikir pada waktu beralih dari suatu pandangan disiplin ilmu tertentu ke pandangan disiplin ilmu lainnya.

Dalam pendekatan antar disiplin, guru pendidikan ilmu sosial dapat meminta bantuan temannya yang memiliki latar belakang pendidikan dalam suatu disiplin ilmu lain untuk membantu membahas pokok permasalahan penduduk itu. Kenyataan semacam ini seringkali harus dilakukan karena tidak semua guru menguasai disiplin ilmu sosial lainnya dengan baik. Lagipula, guru dapat meminta guru disiplin ilmu lain di luar ilmu-ilmu sosial untuk membantunya dalam membahas suatu persoalan. Dengan demikian, pengembangan materi melibatkan banyak guru dan tidak perlu terbatas hanya pada guru dari pendidikan ilmu-ilmu sosial saja.

Dalam mengembangkan pendekatan antardisiplin ini, perencanaan pengajaran sudah harus dilakukan sejak awal semester atau awal catur wulan. Pada waktu itu sudah harus ditentukan pokok bahasan mana yang akan diajarkan secara antardisiplin. Setelah itu harus dibicarakan dengan teman sejawat mengenai sumbangan dari disiplin ilmunya terhadap pokok permasalahan yang sudah diidentifikasi. Tentu saja pada waktu itu teman sejawat yang bersangkutan mungkin mengajukan juga pokok bahasan dari disiplin ilmunya yang meminta bantuan pengembangan dari disiplin ilmu lainnya.

Konsekuensi dari apa yang dikemukakan dalam dua alinea diatas. Pengajaran dalam tim untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial merupakan kenyataan pendidikan yang tak dapat dielakkan. Artinya, pada waktu suatu pokok bahasan dibicarakan maka guru dari berbagai disiplin membantu melihat masalah dari pandangannya. Bentuk pengajaran yang demikian seringkali sulit dilakukan karena sulitnya pengaturan waktu. Pada waktu yang bersamaan guru yang diharapkan membantu suatu kelas harus hadir di kelasnya sendiri untuk mata pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu dalam semester mungkin cukup sekali guru melakukan pengajaran melalui tim ini.

Selain kesulitan dalam pelaksanaan, kelemahan dari pendekatan antardisiplin ialah ia menghendaki kemampuan berfikir yang lebih tinggi. Siswa diminta untuk beralih dalam berfikir dari satu disiplin ke disiplin lain secara cepat dalam waktu yang dapat dikatakan hampir bersamaan. Kemampuan yang demikian memerlukan latihan dan waktu yang memadai sehingga siswa menjadi terampil.

Termasuk ke dalam pendekatan *korelatif* adalah pendekatan yang dinamakan multidisiplin. Dalam perencanaannya, pendekatan ini lebih rumit dibandingkan pendekatan antardisiplin tetapi ia lebih mudah dalam pengajarannya. Dalam pendekatan

ini kedudukan setiap disiplin ilmu itu sejajar (*juxtaposition*) (Hasan, 1976) dan pengajaran dapat dilakukan dalam waktu yang terpisah; tidak perlu pada jam yang sama asalkan dalam minggu yang sama.

Dalam pendekatan multidisiplin, materi pelajaran untuk satu pertemuan dikembangkan sedemikian rupa sehingga siswa belajar mengenai suatu pokok bahasan dari berbagai disiplin ilmu. Perbedaannya dari pendekatan antardisiplin ialah dalam pendekatan multi disiplin pokok bahasan utama tidak ada dan disiplin utama untuk suatu pokok bahasan tidak ada juga. Setiap disiplin ilmu memiliki kedudukan sejajar dengan pokok bahasan yang dibicarakan adalah pokok bahasan utama.

Ada dua cara yang dapat dikembangkan dalam penerapan pendekatan multi disiplin. Cara pertama adalah yang termudah yaitu dengan cara mencari pokok bahasan atau konsep yang sama untuk setiap disiplin. Dari table tentang konsep-konsep dalam disiplin ilmu-ilmu sosial terlihat bahwa ada beberapa konsep yang memiliki nama yang sama. Konsep ruang dan waktu dapat dibahas bersama antara sejarah dan geografi. Konsep distribusi dapat dibahas bersama antara geografi dengan ekonomi, dan sebagainya.

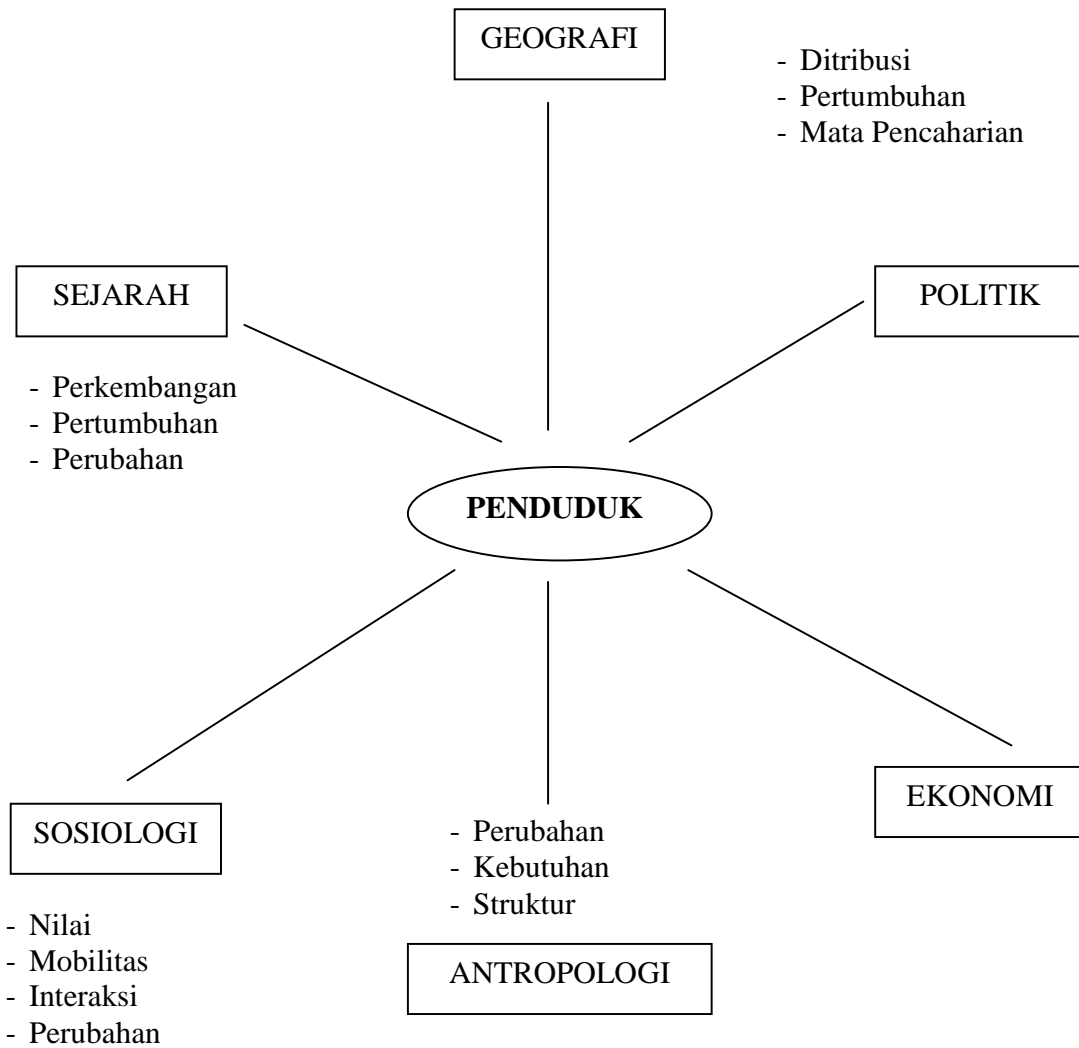
Pada awal semester guru-guru yang mengajar disiplin ilmu-ilmu sosial pada kelas yang sama dapat melakukan identifikasi pokok-pokok bahasan yang sama atau memiliki kesamaan seperti yang dikemukakan dalam pembicaraan mengenai kesamaan nama konsep. Guru-guru tersebut dapat menentukan minggu bersama yang akan digunakan membahas pokok-pokok bahasan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang akan dibicarakan pun sudah dapat dikembangkan pada saat perencanaan tersebut.

Dalam upaya mempertemukan bahasan tadi dalam minggu yang sama guru pendidikan ilmu-ilmu sosial dapat saja mengubah urutan pokok bahasan yang sudah ada dalam kurikulum. Hal ini sepenuhnya dibenarkan kurikulum, bahkan sangat dianjurkan oleh kurikulum SMA 1994 (seperti kurikulum sebelumnya). Meskipun demikian, jika penyamaan minggu bahasan itu menjadi masalah besar karena adanya prinsip asimilasi atau apersepsi yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka guru dapat saja tidak menyamakan minggu bahasan. Guru merencanakan pembahasan itu sejak awal semester bersama guru lain dan masing-masing menentukan minggu bahasan untuk untuk mata pelajarannya masing-masing. Dalam situasi yang demikian, guru yang awal dapat mengatakan dikelas bahwa persoalan itu akan lebih lanjut dalam mata pelajaran berikutnya sedangkan guru yang belakangan dapat merujuk bahasan yang telah dilakukan sebagai bahan apersepsi untuk materi yang akan diajarkannya.

Cara kedua adalah dengan merumuskan pokok bahasan yang dikembangkan bersama dan akan berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial. Sebagai contoh, katakanlah disepakati untuk membahas masalah kependudukan. Hal ini disepakati karena masalah kependudukan adalah masalah yang actual dan diperkirakan akan terus menjadi masalah sosial yang cukup penting. Sedangkan dilihat dari berbagai pandangan disiplin ilmu dapat dikatakan bahwa setiap disiplin ilmu-ilmu sosial dapat membahas masalah kependudukan tersebut (setiap disiplin memiliki konsep yang sesuai untuk membahas masalah penduduk). Dalam pendekatan ini setiap disiplin ilmu membahas mengenai pokok bahasan yang berjudul penduduk tetapi setiap disiplin ilmu mendiskusikan pokok bahasan sepenuhnya dari pokok pikiran keilmuannya. Untuk itu setiap pokok bahasan menggunakan konsepnya masing-masing dalam membahas masalah kependudukan.

Disini kependudukan menjadi topik dan konsep dari suatu disiplin ilmu. Gambar berikut ini menjelaskan perbedaannya dengan pendekatan antardisiplin.

Gambar. 4 : Pendekatan Pengajaran Multidisiplin



Gambar di atas menunjukkan pula bahwa beberapa konsep antara berbagai disiplin ilmu dapat saja sama labelnya tetapi dapat juga berbeda. Semakin banyak konsep yang digunakan untuk membahas masalah yang dimaksudkan maka akan semakin mendalam bahasan yang dilakukan terhadap masalah tersebut.

Dalam model pengembangan materi multidisiplin melalui cara kedua (yaitu diajarkan dalam pertemuan-pertemuan yang berbeda, disesuaikan dengan jadwal pelajaran mata pelajaran tersebut) siswa tidak dihadapkan kepada persoalan harus merubah cara berpikir dalam waktu singkat. Ia memusatkan perhatian itu dari sudut suatu disiplin ilmu

tertentu pada suatu waktu tertentu. Mungkin saja dalam satu minggu mereka belajar persoalan kependudukan dari berbagai disiplin ilmu dalam waktu dan alokasi jam yang telah ditentukan untuk setiap mata pelajaran. Model pengembangan materi kurikulum yang demikian tetap menuntut kerja sama yang baik. Salah satu guru tidak melakukan tugas dengan baik maka keseluruhan kesepakatan menjadi hancur dan pendidikan ilmu-ilmu sosial kembali menjadi pendidikan disiplin ilmu yang terpisah.

3. Pengorganisasian Fusi.

Sesuai dengan namanya dalam organisasi fusi, ciri dan warna disiplin ilmu sudah tidak tampak. Dalam organisasi semacam ini orang tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah bahasan geografi, ekonomi atau lainnya. Fusi itu memberi kesan seolah-olah ada sesuatu yang baru dimunculkan dari disiplin yang ada. Peleburan dalam model fusi tidak harus melahirkan suatu disiplin baru sebagai hasil sintesis dari disiplin ilmu yang ada. Peleburan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan pendidikan dan bukan atas dasar pertimbangan kepentingan pendidikan dan bukan atas dasar pertimbangan keilmuan. Pertimbangan pendidikan mengutamakan kepentingan siswa di atas kepentingan disiplin ilmu

Selanjutnya Hamid Hasan, mengemukakan bahwa pengembangan materi berdasarkan fusi baru dapat dilakukan apabila pokok bahasan tidak lagi diidentifikasi dari suatu disiplin ilmu. Materi yang nantinya dijadikan pokok bahasan haruslah dikembangkan dari fenomena sosial yang ada. Cara lain adalah dengan mengidentifikasi berbagai teori, generalisasi, konsep, prosedur yang berlaku untuk berbagai disiplin ilmu yang ada. Konsep seringkali kaku dan keberlakuannya terbatas pada suatu disiplin ilmu tertentu. Pengembangan materi yang berdasarkan pendekatan organisasi fusi meminta pengorbanan disiplin ilmu untuk tidak menonjolkan dirinya. Sebagai contoh apabila pokok bahasan yang diidentifikasi dan akan diajarkan adalah penduduk maka konsep-konsep penting digunakan untuk membahas pokok bahasan tersebut tanpa mengidentifikasi disiplin ilmu asal konsep tersebut. Oleh karena itu konsep distribusi penduduk dilihat dari distribusi geografis, distribusi sosiologis ataupun distribusi antropologis. Siswa memiliki keleluasaan penggunaan konsep distribusi.

Contoh pokok bahasan kependudukan

Gambar. 5 : Pengajaran dengan pendekatan fusi

- Pengertian
- Distribusi (ruang, waktu, ekonomi)
- Kebutuhan (sosial, budaya, ekonomi)
- Kelompok (status sosial, ekonomi, etnis, tempat tinggal)

KEPENDUDUKAN

Kependudukan

Pada gambar terlihat bahwa untuk mempelajari kependudukan siswa belajar tentang pengertian, distribusi, kebutuhan, dan pengelompokan. Konsep yang dicantumkan di sini hanyalah sebagian dari konsep-konsep yang mungkin dapat digunakan untuk mempelajari kependudukan. Konsep-konsep yang digunakan di atas dipilih berdasarkan kegunaannya dalam mempelajari kependudukan dan secara langsung konsep-konsep tersebut tidak dinyatakan sebagai konsep suatu disiplin ilmu tertentu. Ia merupakan konsep yang memiliki pengertian lebih umum dari pengertian yang diberikan suatu disiplin ilmu tertentu. Dengan demikian siswa tidak lagi dituntut untuk memanfaatkan pengertian yang diberikan masing-masing disiplin.

Pengorganisasian materi yang berdasarkan pendekatan fusi memang dapat dikatakan banyak menghilangkan karakteristik disiplin ilmu. Siswa diajak berpikir dalam alur berpikir logis yang sifatnya umum dan tidak terbatas pada logika keilmuan disiplin tertentu. Pengorganisasian materi fusi untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial melahirkan kelompok tertentu dalam social studies dalam IPS. Dalam kenyataan kurikulum yang ada di sekolah sekarang, kurikulum IPS SD dan SMP dimaksudkan sebagai organisasi fusi sedangkan pengembangan materi pendidikan ilmu sosial di SMA menggunakan pendekatan terpisah.

L A T I H A N

1. Apa yang dimaksud dengan materi kurikulum ?
2. Apa yang dimaksud dengan Konsep menurut Brunner, Goodnow dan Austin?
3. Sebut teori besar menurut Toynbee?

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Materi kurikulum adalah proses, prosedur, dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh siswa dalam mempelajari substansi (pandangan, tema, topik, fenomena, fakta, peristiwa, konsep, generalisasi dan teori) tersebut, dalam arti apa yang dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya.
2. Konsep diartikan sebagai abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat.
3. Teori besar menurut Toynbee adalah perkembangan peradaban umat manusia terdiri dari 4 masa, yaitu kelahiran peradaban (the geneses of civilizations), pertumbuhan peradaban (the grows of civilizations), kemunduran peradaban (the breakdowns of civilizations) dan kehancuran peradaban (the disintegrasi of civilizations)

Rangkuman

Pengertian materi adalah mencakup aspek substansi dan aspek proses. Aspek substansi memberikan apa yang harus dipelajari siswa sebagai suatu objek studi. Aspek proses memberikan apa yang harus dipelajari siswa sebagai suatu alat yang akan digunakan untuk belajar substansi lebih lanjut. Aspek substansi terdiri atas teori,

generalisasi, konsep, fakta, sikap, nilai dan moral. Aspek proses terdiri atas keterampilan akademik dan sosial.

Pengembangan materi pendidikan ilmu-ilmu sosial dari pendekatan disiplin tunggal atau terpisah, pendekatan korelasi yang terdiri atas disiplin dan multi disiplin. Perbedaan antara ketiganya digambarkan dalam kedudukan setiap disiplin dalam menentukan tata urutan materi yang dikaji. Dalam pendekatan disiplin terpisah kebebasan disiplin dalam menentukan materi sangat besar, dapat dikatakan sepenuhnya. Pendekatan korelatif kemerdekaan yang demikian sudah tidak mungkin dilakukan setiap disiplin harus melepaskan kebebasan dalam menentukan materi disiplin ilmunya semata. Setiap disiplin ilmu harus memperhatikan kepentingan disiplin ilmu lainnya.

Perbedaan antara pendekatan antar disiplin dan multidisiplin digambarkan dalam perbedaan kebebasan dan kedudukan disiplin ilmu terhadap pokok bahasan. Dalam pendekatan antardisiplin kebebasan lebih besar dimiliki oleh suatu disiplin ilmu yang dinyatakan sebagai disiplin ilmu utama. Sedangkan dalam disiplin ilmu penunjang harus membatasi dirinya sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh disiplin ilmu utama.

Dalam pengembangan materi yang berdasarkan pendekatan multidisiplin ilmu memiliki kebebasan yang sama sepanjang kebersamaan di antara disiplin ilmu terjaga. Untuk suatu pokok bahasan setiap disiplin ilmu dapat mengkajinya dari konsep-konsep yang relevan yang dimilikinya untuk pokok bahasan tersebut. Pendekatan fusi di mana dinyatakan bahwa ciri disiplin ilmu sudah tidak mendapatkan tempat. Pengembangan materi seperti hal itu dirasakan sesuai untuk pengorganisasian kurikulum yang menggunakan pendekatan IPS seperti yang dilakukan untuk SMP. Permasalahan sosial dijadikan dasar utama dan bukan disiplin ilmu. Materi dari disiplin ilmu dikembangkan untuk membahas pokok permasalahan sosial yang telah diidentifikasi. Dalam banyak hal pendekatan fusi memiliki kesamaan dengan pendekatan multidisiplin, terkecuali dalam kemandirian dan keutuhan masing-masing disiplin.

Test Formatif 2

1. Teori adalah kompisisi yang dihasilkan dari pengembangan sejumlah preposisi atau generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis. Teori ini dikemukakan oleh.....

- A. Bloom
- B. Krathwohl
- C. Goetz dan LeCompte
- D. Lincoln

2. Yang dimaksud dengan teori besar atau grand theory adalah :

- A. Sistem yang secara ketat mengkaitkan preposisi-preposisi dan konsep-konsep yang abstrak sehingga dapat digunakan menguraikan menjelaskan, dan memprediksi secara komprehensif sejumlah fenomena besar secara non - probabilitas.
- B. Preposisi atau konsep yang hanya berlaku untuk kelompok populasi lingkungan, atau waktu tertentu.
- C. Sebagai keterhubungan yang longgar (tidak ketat) antara sejumlah asumsi, konsep dan preposisi yang membentuk pandangan ilmuwan tentang dunia.

- D. Preposisi atau konsep yang hanya berlaku untuk kelompok populasi lingkungan atau waktu tertentu.
3. Dari ke empat teori di bawah ini manakah yang termasuk teori yang paling rendah ?
- A. Theoretical Models
 - B. Formal and Middle-range Theory
 - C. Substantive Theory
 - D. Grand Theory
4. Dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial, teori yang banyak melibatkan siswa secara langsung dalam proses, adalah ...
- A. Formal and Middle-range Theory
 - B. Substantive Theory
 - C. Theoretical Models
 - D. Grand Theory
5. Materi kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial yang paling banyak digunakan adalah konsep. Yang dimaksud dengan konsep adalah ...
- A. Abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat.
 - B. Menggambarkan keterhubungan antara dua atau lebih konsep dan merupakan hasil yang sudah teruji secara empirik.
 - C. Abstraksi ketidak samaan dari sekelompok benda atau sifat.
 - D. Tidak menggambarkan keterhubungan antara dua atau lebih konsep.
6. Yang dimaksud dengan generalisasi adalah....
- A. Kesimpulan yang tidak objektif.
 - B. Kesimpulan secara khusus
 - C. Kesimpulan umum.
 - D. Kesimpulan yang objektif
7. Konsep memiliki anggota dengan atribut yang memiliki nilai beragam, disebut dengan konsep ?
- A. Konjungtif
 - B. Disjungtif
 - C. Konstruktif
 - D. Relasional .
8. Fakta adalah “building blocks” yang digunakan untuk menghubungkan konsep dan generalisasi. Pernyataan tersebut di atas dikemukakan oleh ...
- A. Schunche.
 - B. Bloom
 - C. Brunner.
 - D. Goodnow
9. Yang dimaksud dengan sikap dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial, adalah
- A. Sesuatu yang dilakukan seseorang yang menyangkut aspek psikologis

- B. Kedenderungan psikologis seseorang terhadap benda, sifat, keadaan, pekerjaan, pendapat dan sebagainya.
 - C. Sesuatu yang berkenaan dengan perilaku seseorang dalam bertindak
 - D. Suatu tindakan, pendapat atau hasil kerja.
10. Memiliki rasa cinta tanah air merupakan bentuk...
- A. Moral.
 - B. Sikap.
 - C. Nilai
 - D. Kepribadian

BALIKAN & TINDAK LANJUT

Cocokkanlah jawaban anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat dibagian akhir Bahan Belajar Mandiri ini. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, kemudian gunakan rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda dalam materi Kegiatan Belajar 2.

Rumus

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, anda dapat melanjutkan dengan Kegiatan Belajar 3. akan tetapi, jika tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, silahkan Anda mengulangi kembali mempelajari Kegiatan Belajar 2, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Tes Formatif - 1

1. A. Hamid Hasan
2. B. Perbedaan pendekatan yang diterapkan pada masing-masing jenjang persekolahan
3. A. National Commuission for the Social Studies
4. A. Integrated.
5. A. Manusia seutuhnya
6. C. Budaya
7. D. Aborijin
8. C. Bahasa, Kesenian, dan adat istiadat
9. A. Amerika Serikat
10. C. Tahun 1972-1973

Tes Formatif - 2

1. C. Goetz dan Leompte
2. A. Sistem yang secara ketat ,mengkaitkan preposisi-preposisi dan konsep-konsep yang abstrak sehingga dapat digunakan menguraikan, menjelaskan, dan memprediksi secara komprehensif sejumlah fenomena besar secara non-probabilitas
3. C. substatif theory
4. B. substantive theory
5. A. Abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat
6. C. kesimpulan umum
7. A. Konjungtif
8. A. Schunche
9. B. Kecenderungan psikologis seseorang terhadap benda, sifat, keadaan, pekerjaan, pendapat dan sebagainya.
10. C. Nilai

GLOSARIUM

- Fakta** : kesimpulan-kesimpulan yang diambil seseorang berdasarkan cara pandang keilmuan terhadap data atau sekumpulan data. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan itulah maka data yang sudah dikumpulkan memiliki makna.
- Generalisasi** : kesimpulan yang berkenaan dengan sifat dan jenis keterhubungan antara dua konsep atau lebih dan kesimpulan itu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang memiliki daya keberlakuan dalam berbagai ruang dan waktu. Dalam kesimpulan yang dinamakan generalisasi itu terdapat juga struktur keterhubungan antara konsep-konsep.
- Konsep** : abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Dalam keterhubungan itu terdapat struktur yang menggambarkan keterhubungan antara berbagai atribut suatu konsep. Konsep memiliki nama yang disebut label dan memiliki isi yang dinyatakan dalam definisi.
- Konsep disjungtif** : adalah konsep yang memiliki anggota dengan atribut yang memiliki nilai beragam. Adanya perbedaan dan keragaman dalam nilai atribut itu justru menjadi persamaan di antara keanggotaan konsep.
- Konsep kojungtif** : konsep yang memiliki anggota dengan persamaan yang sangat banyak. Dapat dikatakan persamaan antara satu anggota dengan anggota lain meliputi hampir sebagian besar nilai atribut konsep.
- Konsep relasional** : konsep yang dianggap paling tinggi tingkat abstraksinya karena persamaan yang ada di antara anggota konsep dikembangkan berdasarkan kriteria tertentu dan tidak lagi bersifat konkret.
- Materi proses** : materi yang dipelajari siswa tetapi tidak berkenaan dengan aspek seperti fakta, konsep, generalisasi atau pun teori berkenaan dengan prosedur yang harus dilakukan. Materi pendidikan yang bersifat proses harus dipelajari dalam bentuk kegiatan dan pelaksanaan proses itu sendiri.
- Materi Substansi** : materi yang secara universal dipelajari siswa di kelas-kelas pendidikan ilmu-ilmu sosial saat ini. Dalam materi yang demikian siswa mengkaji fakta, konsep, definisi, pendapat, generalisasi, teori, nilai, moral, dan sebagainya.
- Pendekatan komunitas yang meluas** ; pendekatan yang dikembangkan Paul Hanna berdasarkan keterdekatan lingkungan terhadap siswa. Lingkungan terdekat adalah keluarga, sampai lingkungan dunia. Dalam

lingkungan-lingkungan tersebut siswa mempelajari sembilan aspek kehidupan manusia.

Daftar Pustaka

- Ausubel, D.P. dan Roinson, F.G. 1969. *School Learning: An Introduction to Educational Psychology*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Anggani Sudono. *Alat permainan dan Sumber Belajar TK*. Jakarta : Depdikbud.
- Badruzaman, dkk. 2005. *Media dan Sumber Belajar TK*. Pusat Penelitian Universitas Terbuka, Jakarta.
- Barnes,B.1982. T.S. *Kuhn and Social Sciences*. London: The Macmillan Press.
- Bloom, B.S. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives*. London: Longman.
- Hasan, S.H. 1976. *The Analysis of The Use of Inquiry Approach in Teaching Social Studies in Indonesia*. Unpublished MA Extended Essay. Sydney: Macquarie University.
- Joyce, B. dan Weil, M. 1980. *Models of Teaching*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Marsh, C. 1991. *Teaching Social Studies*, New York: Prentice Hall.
- Martorella, P.H. 1991. *Knowledge and Concept Development in Social Studies*, dalam *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning* (ed. Shaver, J.P). New York: Macmillan Publishing Company, Inc.
- Nana Sudjana, Ahmad Rivai. *Teknologi Pengajaran*. Sinar Baru. Bandung.
----- *Media Pengajaran*. Sinar Baru. Bandung.
- Naylor, D.T. dan Diem, R. 1987. *Elementary an Middle School Social Studies*. New York: Random House.
- Phenix, P.H. 1964. *The Realms of Meaning*. New York: Mc.Graw-Hill Book Company.
- Suchman, J.R. 1970. *Motivation Inherent in The Pursuit of Meaning: Or The Desire to Inquire, dalam Intrinsic Motivation: A New Direction in Education* (Eds. Day, H.I. dkk). Toronto: The Ontario Institute for Studies in Education.
- S. Hamid Hasan. 1995. *Pendidikan Ilmu Sosial*. Depdikbud, Dirjen Dikti, Senayan, Jakarta.

Taba, H. 1967. *Curriculum Development: Theory into Practice*. New York: Harcourt, Brace, and Jovanich.

Tim Dosen, UPI Kampus Tasikmalaya. 2006. *Bahan Ajar Pendidikan IPS SD*.

----- *Konsep-konsep Dasar IPS SD*.

Udin. S. Winataputra, dkk. 2007. *Materi dan Pembelajaran IPS SD*. Universitas Terbuka. Jakarta.